

e-news letter

SEPTEMBER III 2020

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag

**SEGERA
USUT TUNTAS**
Kasus Penyerangan
Syekh Ali Jaber



Insiden Penusukan Syekh Ali Jaber

Fraksi PKS: Batu Ujian Kepolisian Ungkap Skenario



**Habib
Aboebakar
Alhabsy**



Keberanian pelaku menjalankan aksinya di depan umum pasti juga sudah dipersiapkan dengan matang. Tidak mungkin hal ini dilakukan dengan spontan, bisa jadi tindakan itu sudah direncanakan sebelumnya

**Fahmy
Alaydroes**



Menangani kasus percobaan pembunuhan Syekh Ali Jaber, tokoh mubaligh yang lembut dan sangat cinta Indonesia ini sebagai batu ujian bagi Kepolisian, sejauh mana kemauan dan kemampuan menyelidiki sampai tuntas dan terang benderang, apa dan siapa sesungguhnya pelaku yang kejam dan jahat ini.

**Sakinah
Aljufri**



Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja harus diusut tuntas, supaya tokoh agama tidak ada rasa khawatir menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tokoh dan ulama. Tugas Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk tokoh Agama

Kutuk Keras Penyerangan Syech Ali Jaber

Fraksi PKS Minta Polisi Usut Tuntas dan Terang Benderang!

Mengingat kejadian ini bukan yang pertama bahkan beberapa kali terjadi menimpa ulama kita, maka aparat kepolisian harus menyelidiki secara serius apakah ada skenario yang lebih besar atas penyerangan dan ancaman terhadap para ulama yang dilakukan oleh anasir jahat yang mengoyak kedamaian umat.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (14/09) — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengutuk keras penyerangan terhadap Syekh Ali Jaber yang tengah melakukan aktivitas dakwah di Lampung.

Jazuli meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan membuka secara terang benderang motif pelaku dan kemungkinan otak dibalik peristiwa tersebut.

"Mengingat kejadian ini bukan yang pertama bahkan beberapa kali terjadi menimpa ulama kita, maka aparat kepolisian harus menyelidiki

secara serius apakah ada skenario yang lebih besar atas penyerangan dan ancaman terhadap para ulama yang dilakukan oleh anasir jahat yang mengoyak kedamaian umat," ungkap Jazuli.

Pemerintah dan aparat keamanan termasuk intelijen perlu membaca secara komprehensif apakah serangan dan ancaman kepada ulama selama ini disengaja.

"Kalaupun spontan apalagi dilakukan orang gila masa terjadi berulang di berbagai tempat. Ini yang kita titip pesan

kepada aparat," tegasnya.

Tentu kita berharap aparat keamanan bisa membuka motif dan memberi ketenangan pada umat. Sebaliknya, Jazuli berharap umat Islam tidak terprovokasi, meski tetap harus waspada khususnya dalam menjaga para ulama dan dai yang berdakwah di tempat masing-masing.

Tanggung Jawab Negara Melindungi Ulama

Anggota Komisi I DPR ini menekankan tanggung jawab negara dan pemerintah untuk lebih meningkatkan perlindungan kepada ulama, tokoh, dan simbol agama dari berbagai ancaman dalam bentuk apapun baik verbal (penghinaan dan penistaan) apalagi ancaman fisik seperti yang dialami Syech Ali Jaber.

"Ulama adalah pewaris Nabi, mereka adalah suluh atau penerang yang menjaga keimanan dan akhlak mulia masyarakat. Barokahnya bangsa Indonesia karena ada ulama. Maka negara harus menempatkan mereka pada



posisi terhormat dan melindunginya dengan segala upaya," tegas Jazuli.

Atas alasan tersebut, Fraksi PKS DPR secara sadar menginisiasi RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama dalam rangka memuliakan posisi mereka dalam kehidupan berbangsa dan negara serta menegakkan tanggung jawab negara untuk melindungi mereka dari

berbagai ancaman, penghinaan, penodaan dan penistaan.

"Dengan kejadian yang menimpa Syech Ali Jaber ini semakin urgen kebutuhan untuk segera menyelesaikan RUU tersebut. Agar setiap warga negara memiliki kesadaran untuk memuliakan agama, tokoh ulama dan simbol-simbolnya yang mulia," pungkas Jazuli.

Penikaman Syekh Ali Jaber

Mardani: Membahayakan seperti Penyerangan pada Novel Baswedan

Ulama di masyarakat punya kedudukan yang mulia, bahkan dikatakan Ulama itu pewaris Nabi. Karena itu aparat mesti mengusut tuntas, mengetahui apa motif dan siapa saja dibalik penyerangan ini. Jangan dianggap sepele

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (15/09) — Syekh Ali Jaber menjadi korban penikaman pemuda inisial AA saat dirinya memberikan ceramah di Masjid Falauhuddin, Bandar Lampung, Minggu (13/09/2020).

Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan kasus yang menimpa Syekh Ali Jaber adalah peristiwa yang membahayakan.

Bahkan kasus itu mengingatkannya kepada kasus penyerangan atau penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Ini peristiwa yang membahayakan, seperti penyerangan pada Novel Baswedan," ujar Mardani, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (14/09/2020).

Mardani kemudian mengatakan aparat kepolisian harus mengusut kasus penikaman hingga tuntas.

Apalagi, anggota Komisi II DPR RI itu melihat ulama memiliki kedudukan yang mulia di masyarakat.

ardani juga berpesan agar kasus semacam ini tak dianggap sepele.

"Ulama di masyarakat

punya kedudukan yang mulia, bahkan dikatakan Ulama itu pewaris Nabi. Karena itu aparat mesti mengusut tuntas, mengetahui apa motif dan siapa saja dibalik penyerangan ini. Jangan dianggap sepele," kata Mardani.

Diketahui, Syekh Ali Jaber ditikam saat tausiyah di Masjid Falauhuddin Jalan Pamin Nomor 45 Sukajawa, Bandar Lampung pada Minggu (13/9/2020) kemarin.

Pelaku langsung ditangkap oleh jamaah usai melakukan penikaman.



Penusukan Syekh Ali Jaber

Iskan: RUU Perlindungan Ulama Harga Mutlak

“Saat ini kita betul-betul krisis terhadap perlindungan ulama. Padahal mereka sedang menjalankan tugasnya sebagai juru dakwah dan dilindungi oleh konstitusi

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (15/09) — Anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mengemukakan keras tragedi penusukan Ulama syekh ali jaber yang ditusuk seorang pria pada Minggu (13/09/2020) lalu.

Peristiwa ini terjadi saat Syekh Ali Jaber mengisi ceramah di Masjid Falaahuddin, Bandar Lampung. Tangan pendakwah itu terluka akibat tusukan. Pelaku langsung dibekuk orang-orang di lokasi.

“Saat ini kita betul-betul krisis terhadap perlindungan ulama. Padahal mereka sedang menjalankan tugasnya sebagai juru dakwah dan dilindungi oleh konstitusi,” ujar Iskan

Menurutnya, kejadian tersebut sudah melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) dan

serangan terhadap konstitusi.

“Pasal 28 E ayat (1) dan 29 ayat (2) UUD 1945 merupakan dasar hukum yang menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing,” urainya.

Politisi PKS ini menyanggah pelaku penusukan Syekh Ali Jaber disebut memiliki gangguan kejiwaan.

“Rentetan kasus penyerangan ulama ini bukan pertama kali, banyak terjadi di berbagai wilayah.

Bahkan ada yang sampai meninggal, yaitu ulama dari ormas Persis, kejadian di Jawa Barat 2 tahun silam. Itu juga diawal disebut orang gila. Ada juga imam mesjid di pekanbaru yang ditusuk saat memimpin

shalat berjamaah.

“Jadi kami risih, sedikit-sedikit langsung pelakunya dibilang orang gila. Masa iya sih, orang gila bisa memilih korbannya dan pada saat korban sedang menjalankan aktifitas dakwahnya pula.” terang Iskan.

Selanjutnya, beliau meminta Kepolisian mengusut tuntas kasus penusukan Terhadap ulama ini.

“Bahkan kalau bisa, buat ini terang benderang. Kami mendesak pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas tindakan kejahatan pelaku sekaligus membongkar motif penusukan dan aktor intelektual di balik insiden tersebut. Bahwa ada informasi yang menyebutkan pelaku mengidap gangguan kejiwaan hendaknya jangan mudah dipercaya. Pihak kepolisian harus segera melakukan penelitian dan penyelidikan dengan melibatkan para pakar atau ahli di bidang kejiwaan” ungkapnya.

Maka dari itu, lanjutnya, Fraksi PKS mendorong semua pemangku kepentingan untuk



merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama, yang kini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020.

“RUU nya telah disepakati DPR dengan nama RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji) yang diusulkan oleh Fraksi PKS, PKB, dan PPP. RUU tersebut melindungi tidak hanya ulama atau tokoh agama dari kalangan Islam, tetapi untuk semua agama lainnya yang ada

di Indonesia,” tutur Iskan.

“Rasa-rasanya krisis terhadap perlindungan ulama di Indonesia sudah semakin parah. Maka, RUU ini merupakan harga mati yang harus diperjuangkan bersama. Kami meminta agar stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya agar bisa saling bahu-membahu dalam mempercepat terselesainya proses RUU perlindungan ulama ini. Agar dikemudian hari, kasus-kasus milimukan seperti ini tidak pernah terulang kembali,” pungkask Iskan menambahkan.

Penusukan terhadap Syekh Ali Jaber

Aboe Bakar: Aparat Harus Dalam Motif Pelaku

Keberanian pelaku menjalankan aksinya di depan umum pasti juga sudah dipersiapkan dengan matang. Tidak mungkin hal ini dilakukan dengan spontan, bisa jadi tindakan itu sudah direncanakan sebelumnya,

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

akarta (15/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsy, mengancam keras penusukan terhadap Syekh Ali Jaber saat sedang berdakwah di Lampung, Ahad, (13/09/2020).

"Saya mengutuk keras penyerangan terhadap seorang ulama, tentunya tidak bisa dianggap hal enteng atau biasa," tegas pria yang akrab disapa Habib Aboe ini.

Habib Aboe menegaskan, dengan kejadian tersebut, aparat penegak hukum harus mengusut tuntas persoalan ini.

"Jangan sampai perkara ini

disederhanakan dengan mengatakan bahwa pelaku adalah orang gila," tandas Anggota Komisi III DPR RI ini.

Jika dilihat dari video yang beredar, lanjut Habib Aboe, pelaku memang fokus mentarget Syekh Ali Jaber, bahkan terlihat terampil menggunakan pisau untuk menyerang.

"Keberanian pelaku menjalankan aksinya di depan umum pasti juga sudah dipersiapkan dengan matang. Tidak mungkin hal ini dilakukan dengan spontan, bisa jadi tindakan itu sudah direncanakan sebelumnya," terang Ketua Mahkamah

Kehormatan Dewan ini.

Disinilah perlunya pendalaman oleh aparat, imbuhnya, apalagi beredar info adanya pengakuan bahwa pelaku disuruh untuk menyerang Syekh Ali Jaber.

"Itu semua harus ditelusuri dengan baik, jika tidak hal ini akan dapat meresahkan masyarakat. Seolah para pelaku penyerangan kepada para ulama selalu orang gila. Jangan sampai ada yang menganggap ini sebagai modus untuk menutup perkara penyerangan terhadap para ulama," tegas Bendahara Fraksi PKS DPR RI ini.



Percobaan Pembunuhan terhadap Ulama

Fahmy Alaydroes: Polisi Harus Selidiki hingga Tuntas

kejadian tersebut menambah semakin memburuknya wajah keamanan dan kedamaian di Negeri kita ini. Lebih serius lagi, peristiwa tersebut menimpa seorang ulama dan tokoh Islam yang dikenal lembut dan selalu membawa pesan-pesan kedamaian. Penganiayaan terhadap ulama, aktifis/tokoh Islam telah berulang kali terjadi,

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (14/09) — Anggota DPR dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes, menanggapi peristiwa penusukan atau lebih tepatnya percobaan pembunuhan yang menimpa Syekh Ali Jaber yang dilakukan oleh pemuda di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung, Ahad (13/09/2020).

Menurut Fahmy, kejadian tersebut menambah semakin memburuknya wajah keamanan dan kedamaian di Negeri kita ini.

"Lebih serius lagi, peristiwa tersebut menimpa seorang ulama dan tokoh Islam yang

dikonal lembut dan selalu membawa pesan-pesan kedamaian. Penganiayaan terhadap ulama, aktifis/tokoh Islam telah berulang kali terjadi," terang Anggota Komisi X DPR RI ini.

Fahmy menambahkan, dua bulan yang lalu, penyerangan terhadap ulama juga terjadi di Pekanbaru, Riau. Korbannya adalah Imam Masjid Al Falah Darul Muttaqin.

"la ditusuk oleh jamaahnya menggunakan pisau saat memimpin doa usai salat Isya berjamaah, Kamis

(23/07/2020) malam. Kejadian seperti ini sudah sering berulang, bahkan sejak beberapa tahun terakhir," tutur Fahmy prihatin.

Fahmy melanjutkan, bila aparat penegak hukum, terutama pihak Kepolisian tidak tanggap atau terlalu dini menyimpulkan bahwa tersangka mengidap penyakit jiwa (sebagaimana yg sudah terjadi beberapa kasus), bukan tidak mungkin tumpukan kekecewaan dan ketidakpercayaan kepada Pemerintah semakin menjadi-jadi.

"Bila pemerintah tidak menghadirkan keamanan, keadilan, dan 'bersikap' memihak kepada satu golongan, membenci golongan lain, menyuarakan diksi dan narasi yang cenderung menyalahkan pihak-pihak yang berseberangan dengan Pemerintah, suasana persatuan dan keutuhan bangsa menjadi taruhannya," papar Anggota DPR Asal Dapil Jabar V ini.

Apalagi, imbuhnya, kita sedang menghadapi musibah pandemi yang sangat serius dan berpotensi melumpuhkan



ekonomi, sungguh diperlukan sikap yang bijak dari pejabat dan pemimpin negeri untuk merangkul dan mengajak semua pihak untuk bersama, bergotong royong menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman kehancuran.

"Menangani kasus percobaan pembunuhan Syekh Ali Jaber, tokoh mubaligh yang lembut dan sangat cinta Indonesia ini sebagai batu ujian bagi Kepolisian, sejauh mana kemauan dan kemampuan menyelidiki sampai tuntas dan terang benderang, apa dan siapa sesungguhnya pelaku yang kejam dan jahat ini. Mari kita tunggu bersama," tegas

Fahmy Alaydroes.

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin mengatakan rentetan kekerasan yang menimpa ulama, tokoh agama dan tempat ibadah pada akhirnya memunculkan persepsi di masyarakat bahwa kasus tersebut tidak berdiri sendiri.

"Sejak 2018, Majelis Ulama Indonesia pernah meminta kepada Pemerintah agar menangani kasus-kasus kekerasan yang menimpa ulama segera ditangani secara serius," ungkap Din.

Kutuk Keras Penyerangan Syech Ali Jaber Anggota FPKS Kecam Keras dan Minta Kasusnya Diusut Tuntas

Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja harus diusut tuntas, supaya tokoh agama tidak ada rasa khawatir menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tokoh dan ulama. Tugas Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk tokoh Agama

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI

Palu (14/09) — Peristiwa tragis yang menimpa ulama dan dai kondang Syekh Ali Jaber yang diserang pria saat memberikan tausiyah pada kegiatan wisuda tahfidz di Masjid Falahudin, Kota Bandar Lampung, Minggu (13/09/2020).

Menanggapi kejadian ini, Sakinah Aljufri, Anggota Komisi X DPR RI mengecam keras aksi penusukan yang menyasar ulama dan tokoh agama Syekh Ali Jaber. Terlebih peristiwa itu itu dilakukan disaat syekh Ali

Jaber sedang memberikan tausiyah dihadapan jamaah.

“Saya mengutuk keras pelaku penusukan Syekh Ali Jaber dan sangat disayangkan ada berbagai kekerasan yang menimpa tokoh ummat Islam,” ungkap Sakinah.

Politikus PKS dapil Sulawesi Tengah ini pun meminta pihak berwenang untuk mengusut sampai tuntas.

“Pihak berwenang harus mengusut tuntas dan dicari benang merahnya agar tidak

ada diskriminasi,” ungkap Sakinah.

Sakinah pun menegaskan selama ini kita sering mendengar kata radikalisme dikaitkan dengan umat tertentu yang hafizh al-quran. Ini yang seharusnya terang menderang dikatakan radikalisme, tapi yang anehnya kalau menimpa umat Islam pasti lagi-lagi pelakunya orang gila.

“Selama ini kita sering mendengar kata radikalisme. Radikalisme sudah masuk pada ranah pengajaran, imam serta para hafizh al-quran,” tutur Sekjend Wanita Islam Al-Khairaat.

Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja harus diusut tuntas, supaya tokoh agama tidak ada rasa khawatir menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tokoh dan ulama.

“Tugas Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk tokoh Agama,” pungkask Sakinah.



Insiden Penyerangan Syaikh Ali

Bukhori: Indonesia Darurat Perlindungan Tokoh Agama!

“Kondisi ini menandakan semakin daruratnya perlindungan terhadap tokoh agama. Padahal, para tokoh agama ini berhak memperoleh perlindungan dari tindakan persekusi, kekerasan fisik maupun nonfisik, bahkan ancaman hukum saat melakukan perannya dalam menyampaikan ajaran agama terhadap umatnya”

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (14/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengancam insiden penusukan yang menyasar Syaikh Ali Jaber ketika melakukan safari dakwah di Lampung.

Menurut Bukhori, kekerasan terhadap tokoh agama merupakan serangan terhadap konstitusi sekaligus wujud pelanggaran HAM.

“Pasal 28E ayat (1) dan 29 ayat (2) UUD 1945 merupakan dasar hukum yang menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya. Sementara,

kedudukan Negara adalah untuk menjamin kemerdekaan setiap warganya atas hal-hal tersebut” ungkap Bukhori di Jakarta, Senin (14/09).

Selanjutnya, dalam Pasal 28G UUD 1945 turut mengatur jaminan hak bagi setiap orang untuk memperoleh perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

“Perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara yang dijamin dalam konstitusi tersebut

menakup siapapun tanpa terkecuali, termasuk tokoh agama.” sambungnya.

Menurut data Bareskrim Polri pada 2018, terdapat 21 peristiwa kekerasan dengan korban tokoh agama.

“Kasus tersebut diantaranya terjadi di Aceh, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Sementara di Jawa Barat menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 13 kasus”, terang Bukhori.

Selain itu, tindakan kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan luka cedera yang parah, tetapi sampai berakibat pada kematian sebagaimana menimpa Ustaz Prawoto (Pengurus Ormas Islam Persis) di Bandung yang dianiaya hingga tewas.

Bukhori menilai insiden kekerasan tersebut mengganggarkan bahwa para tokoh agama merupakan kelompok sosial yang sangat rentan dan senantiasa terancam dalam setiap melakukan fungsinya yang sensitif di masyarakat.

Sebab itu, sambungnya, dibutuhkan rencana aksi yang



systematis untuk melindungi mereka. Pasalnya, eksistensi mereka sangat strategis dalam rangka memberikan pemahaman tentang kerukunan umat beragama terhadap masyarakat Indonesia yang heterogen.

“Kondisi ini menandakan semakin daruratnya perlindungan terhadap tokoh agama.

Padaahal, para tokoh agama ini berhak memperoleh perlindungan dari tindakan persekusi, kekerasan fisik maupun nonfisik, bahkan ancaman hukum saat melakukan perannya dalam menyampaikan ajaran agama terhadap umatnya”, tegas Bukhori.

Meskipun demikian, kondisi peraturan dan perundang-undangan yang ada saat ini belum memadai untuk memberikan perlindungan kepada para tokoh agama sehingga tindakan persekusi maupun kekerasan terhadap mereka acapkali berulang, katanya.

Oleh sebab itu, Anggota Komisi VIII DPR ini menilai perlindungan terhadap tokoh agama harus segera diwujudkan secara serius melalui penyediaan perangkat hukum yang memadai untuk mengantisipasi insiden yang berulang.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Penusukan Syekh Ali Jaber

Anggota FPKS Ingatkan Pentingnya RUU Perlindungan Ulama

“Kasus persekusi bahkan upaya pembunuhan terhadap Syekh Ali Jaber seakan jadi pengingat kita bahwa posisi mereka rentan dan penting untuk dilindungi negara

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Fraksi PKS DPR RI

Semarang (14/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, kembali mengingatkan soal pentingnya regulasi yang memberi perlindungan negara terhadap para ulama di tanah air.

“Kasus persekusi bahkan upaya pembunuhan terhadap Syekh Ali Jaber seakan jadi pengingat kita bahwa posisi mereka rentan dan penting untuk dilindungi negara,” kata Fikri, Senin (14/09).

Anggota DPR yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR ini mengutuk aksi penyerangan dan upaya pembunuhan oleh orang tak dikenal kepada pendakwah dan ulama asal Saudi, Syekh Ali Jaber saat mengisi acara kajian keislaman di masjid di Bandar Lampung.

“Alhamdulillah pelaku berhasil dilumpuhkan jemaah dan diserahkan ke polisi, motifnya harus didalami dan apakah ada pelaku intelektual di baliknya?”, tuntut Fikri.

Lebih lanjut, Fikri mendesak para pengampu kepentingan untuk merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) perlindungan ulama, yang kini masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020.

“RUU nya telah disepakati DPR dengan nama RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji) yang diusulkan oleh Fraksi PKS, PKB, dan PPP,” urainya.

Namun dalam format yang diusulkan PKS, RUU tersebut

melindungi tidak hanya ulama (tokoh agama) dari kalangan Islam.

“Semua tokoh agama dari seluruh agama yang ada di Indonesia wajib dilindungi negara,” tegasnya.

Fikri menambahkan, dalam konteks negara Pancasila, bangsa Indonesia tidak lepas dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pertama ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ dalam setiap sendi kehidupannya.

“Negara ini bukan berpaham sekuler yang memisahkan kehidupan bernegara dengan agama, dan bukan juga sebagai negara agama yang berasaskan agama tertentu, namun menjadikan keyakinan agama mereka sebagai poin pertama dalam dasar negara Pancasila,” jelasnya.

Dia mencontohkan tradisi religius bangsa ini yang secara turun temurun dalam setiap momen kehidupannya, sebut saja saat masih berbentuk janin di kandungan, momen-momen bahagia, hingga saat kematiannya selalu melibatkan tokoh agama.

“Seperti pepatah, bangsa



ini selalu terkait dengan ulama mulai dari buaian (dalam rahim ibu) hingga liang lahat (kematian),” katanya.

Ulama atau tokoh agama, menurut Fikri telah menjadi sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di negeri ini, nyaris dalam setiap sendi kehidupan mereka.

“Bahkan dalam menentukan kepemimpinan bangsa, peran tokoh agama selalu menyertai, maka ada istilah guru spiritual,” ucap dia.

Namun berbeda dengan

profesi guru yang telah diakui dalam UU guru dan dosen, profesi ulama (tokoh agama) secara alami diakui oleh setiap elemen bangsa, tapi tidak secara hukum.

“Mereka ini dihormati dan juga jadi pengayom masyarakat, kerap dijadikan rujukan meminta saran dalam setiap permasalahan, tetapi sekaligus juga rentan jadi sasaran atau persekusi,” jelas Fikri.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Hidayat Nurwahid

Jangan Kaburkan Pelakunya sebagai "Orang Gila". Polisi agar usut tuntas, agar negara hukum tegak.



Jazuli Juwaini

ini bukan pertama bahkan beberapa kali terjadi terhadap ulama kita. kepolisian harus serius menyelidiki apakah ada skenario lebih besar dibaliknya.



Bukhori Yusuf

Kondisi ini menandakan semakin daruratnya perlindungan terhadap tokoh agama



Nasir Djamil

Jangan sampai nanti kasus ini hilang tanpa bekas.



Johan Rosihan

Mari terus doakan guru dan ulama Kita agar senantiasa diberi kesehatan



Tifatul Sembiring

Nah pelaku yg nusuk Syekh Ali Jaber ini pasti RADIKAL. Jangan justru curiga sama hafizh Al-Quran dan orang sholeh



Fikri Faqih

ini seakan jadi pengingat kita bahwa posisi mereka rentan dan penting untuk dilindungi negara



Mardani Ali Sera

Jangan dianggap sepele, Aparat mesti mengetahui apa motif dan siapa saja dibalik penyerangan ini.



Iskan Qolba Lubis

Saat ini kita betul-betul krisis terhadap perlindungan ulama. Padahal mereka sedang menjalankan tugasnya sebagai juru dakwah dan dilindungi konstitusi



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Insiden Penusukan Terhadap Syekh Ali Jaber

FRAKSI PKS INGATKAN PENTINGNYA PERLINDUNGAN TERHADAP ULAMA



Korban Covid-19 Tembus Rekor

Pemerintah Harus Percepat Realisasi Insentif Dokter

Pemerintah harusnya segera membayarkan insentif dan santunnya untuk Tenaga Kesehatan (Nakes) yang menangani Covid-19, termasuk para dokter dan perawat yang meninggal akibat terinfeksi virus tersebut.

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (12/09) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid prihatin, dengan jumlah korban covid-19 yang tembus rekor, baik korban di kalangan masyarakat, maupun di Tenaga Kesehatan (NaKes), dari Dokter hingga Perawat.

Karenanya HNW meminta kepada Pemerintah untuk memaksimalkan usaha mengatasi penyebaran covid-19 dengan memaksimalkan kepedulian dan keberpihakan kepada SDM Kesehatan yaitu para Dokter dan Perawat, serta tenaga Rumah Sakit yang tanpa

keterlibatan mereka mustahil juga bisa kelola korban covid-19 dari sisi Kesehatan.

"Dengan bertambahnya korban covid-19 dari kalangan Dokter, Perawat dan RS, tentu sangat mengkhawatirkan," ungkapnya.

HNW mengingatkan bahwa semua bisa dilakukan oleh Pemerintah dengan menyegerakan realisasi janji dan aturan yang telah diumumkan dan disepakati dengan DPR RI.

"Pemerintah harusnya segera membayarkan insentif dan santunan untuk Tenaga Kesehatan (Nakes) yang

menangani Covid-19, termasuk para dokter dan perawat yang meninggal akibat terinfeksi virus tersebut," terang Hidayat.

Menurutnya, hal itu sangat mendesak mengingat lonjakan kasus dan jumlah korban yang meninggal, pada beberapa bulan terakhir yang tentu meningkatkan beban kerja dan beban psikologis para tenaga kesehatan dan Rumah Sakit.

"Tenaga kesehatan makin banyak yang meninggal. Dokter dan perawat yang masih aktif, terkurus tenaga dan mentalnya untuk menangani pasien Covid-19 yang terus menerus berdatangan, sehingga pasti mereka kesulitan mengurus birokrasi administrasi terkait insentif itu. Maka Pemerintah harusnya memudahkan dan jemput bola ke lapangan, agar para Tenaga Kesehatan tersemangati karena merasa mendapatkan perhatian yang serius dan jujur dari Pemerintah, ketika insentif yang sudah dijanjikan Pemerintah itu segera diberikan. Kalau Pemerintah bisa menegaskan siap membayarkan Rp 3 Triliun untuk pembayaran awal vaksin covid-19 dari Sinovac yang belum bisa dipastikan hasil uji klinisnya, wajarnya untuk para Dokter, Perawat dan RS

Untuk pemerintah bisa berikan realisasi janjinya yang jumlahnya tentu jauh lebih sedikit daripada anggaran pembelian vaksin dari sinovac itu", disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di



Jakarta (11/09).

Karenanya, pria yang akrab disapa HNW dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR-RI dengan Sekretaris Utama BNPB (09/09/2020), menagih komitmen yang disampaikan oleh BNPB dalam raker dengan Komisi VIII sebelumnya (13/07/2020).

Dalam raker tersebut, setiap dokter yang wafat akibat paparan Covid-19 akan diberikan santunan sebesar Rp 300 juta, sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan 278/2020 tanggal 27 April 2020.

Selain pemberian

santunan, Keputusan Menteri Kesehatan tersebut juga menyebutkan bahwa tiap Nakes yang memberikan pelayanan Covid-19 juga mendapat insentif per bulan sebesar Rp 15 juta untuk dokter spesialis, Rp 10 juta untuk dokter umum, dan Rp 5 juta untuk tenaga medis lainnya.

HNW mengingatkan bahwa para Nakes sudah bekerja keras dan berkorban sehingga banyak yang wafat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Pandemi Ubah Teknologi 4G ke 5G,

Aleg PKS Dorong Kominfo Segera Buat Aturan

“Aturan yang memberi manfaat sebesar-besarnya untuk seluruh lapisan masyarakat. Bukan aturan yang hanya memberikan keuntungan buat pengusaha pemilik teknologi dan jaringan komunikasi

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (16/09) — Menanggapi rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengatur teknologi 5G dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, Toriq Hidayat, Anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi PKS berharap manfaat teknologi 5G dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“Kondisi pandemi virus corona saat ini secara tidak langsung mempercepat perkembangan teknologi baik di Indonesia maupun negara lain. Hal ini terlihat dari naiknya penggunaan internet di Indonesia”, ungkapnya.

Tujuh bulan terakhir, data communication atau internet

sudah merupakan kebutuhan primer dan akan menjadi salah satu faktor penting bagi pulihnya bidang kesehatan dan ekonomi pasca pandemi.

Komunikasi antar manusia dengan berbagai tujuan, imbuh Toriq, tidak perlu dilakukan tatap muka secara langsung.

“Berbagi data dengan ukuran kecil sampai besar cukup dilakukan dengan berselancar di dunia maya. Oleh karena itu teknologi 5G menjadi penting untuk menggantikan teknologi sebelumnya”, ungkapnya.

Bayangkan File data sebesar 1GB hanya membutuhkan waktu selama 42 detik ketika diunduh pada ponsel berbasis 4G, sedang

teknologi 5G dengan kecepatan yang lebih dari 1 Gbps, file data berukuran 1GB hanya perlu 0,4 detik sampai selesai diunduh, sekejap mata.

“Seorang ahli teknologi jaringan menyebutkan Teknologi 5G tidak bekerja hanya untuk menghubungkan 6 hingga 7 miliar orang, teknologi ini menghubungkan puluhan miliar benda. Benda itu mungkin ponsel, lampu, mobil, bangunan, peralatan rumah tangga, atau apa pun”, ungkap Toriq lagi.

Oleh Karena itu, lanjut Toriq lagi, Pemerintah dalam hal ini Kominfo harus segera membuat aturan penerapan teknologi 5G di Indonesia.

“Aturan yang memberi manfaat sebesar-besarnya untuk seluruh lapisan masyarakat. Bukan aturan yang hanya memberikan keuntungan buat pengusaha pemilik teknologi dan jaringan komunikasi”, tutup Toriq



Aleg PKS Dorong Menhan Serious Perkuat Sistem Pertahanan dan Alutsista

“Indonesia patut berbangga diri karena menjadi negara pertama di ASEAN yang bisa merakit kapal selam sendiri dan dibangun di Fasilitas Kapal Selam PT PAL Indonesia. Kerjasama ini sekaligus *Transfer Of Technology* dari Korea Selatan kepada Indonesia untuk pembuatan Kapal Selam”

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (11/09) — Dalam sebuah media disebutkan bahwa Prabowo mengkritik pertahanan laut Indonesia rapuh dan lemah.

Kapal selam yang dibeli Indonesia dari Korea Selatan memiliki kemampuan terbatas dibanding milik negara tetangga seperti singapura dan vietnam.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Toriq Hidayat, menyatakan bahwa kritikan tersebut disampaikan saat Prabowo belum menjadi Menteri Pertahanan.

“Prabowo menyampaikan peta kekuatan kapal selam Indonesia pada debat keempat pilpres 2019 lalu. Tentu

sekarang saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI maka Prabowo punya kapasitas untuk memperbaiki sistem pertahanan Indonesia, khususnya di laut”, ungkap Aleg asal PKS ini.

Saai ini Indonesia bisa merakit kapal selam sendiri yang diberi nama Alugoro. Kapal Selam Alugoro adalah kapal selam ke-3 dari batch pertama kerjasama pembangunan kapal selam antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) dari Korea Selatan.

“Indonesia patut berbangga diri karena menjadi

negara pertama di ASEAN yang bisa merakit kapal selam sendiri dan dibangun di Fasilitas Kapal Selam PT PAL Indonesia. Kerjasama ini sekaligus *Transfer Of Technology* dari Korea Selatan kepada Indonesia untuk pembuatan Kapal Selam”, ungkap Toriq.

Kapal Selam Alugoro sendiri harus menjalani beberapa tahapan tes sebelum akhirnya dapat beroperasi penuh. Mulai penyelaman di perairan dangkal hingga yang paling dalam.

“Saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang memiliki sistem pertahanan yang kuat dan memproduksi alutsista sendiri sesuai dengan kebutuhannya”, tegas Toriq.

Kunci keberhasilan untuk menjadi negara yang mampu memproduksi alutsistanya sendiri adalah anggaran yang memadai.

“Kemudian serius dan bersungguh-sungguh dalam menjalani seluruh tahapannya”, tambah Toriq.



RDP dengan KemenPAN-RB

Aleg PKS Pertanyakan Kelanjutan SK Pengangkatan Tenaga Honorer

Sampai di mana SK PPPK sekarang? Apakah itu sudah dipastikan ter-anggarkan? Karena jangan sampai nanti kita tidak jadi men-SK-kan gara-gara anggarannya tidak ada, tidak jelas gitu bagaimana penganggarannya.

TEDDY SETIADI, S.Sos.

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (14/09) — Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Selasa (08/09/2020).

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi, mempertanyakan sejauh mana kelanjutan surat keputusan (SK) terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja (PPPK).

"Sampai di mana SK PPPK sekarang?" tanya Teddy Setiadi dalam RDP di Komisi II DPR RI.

Teddy kemudian mempertanyakan pula anggaran untuk SK PPPK.

Dia mewanti-wanti jangan sampai SK tersebut tak terbit karena tak ada anggaran yang diperuntukkan untuk SK PPPK.

"Apakah itu sudah dipastikan ter-anggarkan? Karena jangan sampai nanti kita tidak jadi men-SK-kan gara-gara anggarannya tidak ada, tidak jelas gitu bagaimana

penganggarannya," kata Teddy.

Selama ini, Teddy mengaku menerima banyak aspirasi dari tenaga honorer mengenai nasib mereka yang dijanjikan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bahkan banyak yang sudah lolos seleksi.

Mereka berharap agar nasib mereka segera membaik dengan diberikan kejelasan dan kepastian oleh pemerintah.



Tidak Ingin Penusukan Syekh Ali Jaber Terulang

Nasir Djamil Minta RUU Perlindungan Tokoh Agama Disegerakan

“Lagi-lagi terjadi teror kepada para ulama dan tokoh agama Islam. Karena itu, kita meminta pimpinan DPR dan pemerintah segera menyelesaikan RUU Perlindungan Tokoh Agama

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (14/09) — Aksi penusukan terhadap penceramah, Syekh Ali Jaber di Masjid Fala-huddin, Bandarlampung membuat politisi PKS Muhammad Nasir Djamil geram.

Dia mengecam keras aksi penusukan terhadap ulama ternama di Indonesia tersebut. Selain kecaman keras, Nasir Djamil juga mendesak parlemen dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perlindungan Tokoh Agama agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

“Lagi-lagi terjadi teror kepada para ulama dan tokoh

agama Islam. Karena itu, kita meminta pimpinan DPR dan pemerintah segera menyelesaikan RUU Perlindungan Tokoh Agama,” ujar Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/9).

Legislator asal Aceh ini menduga pelaku penusukan Syekh Ali Jaber tersebut merupakan antek-antek PKI.

“Sebab hanya PKI yang benci dengan ulama dan umat Islam,” imbuhnya.

Nasir meminta agar umat Islam di Indonesia tidak terprovokasi dengan adanya isu

yang beredar di luar sana mengenai penusukan Syekh Ali Jaber.

“Umat Islam harus tenang dan jangan berspekulasi serta terprovokasi dengan orang-orang yang memecah belah akibat adanya kasus penusukan ini,” tandasnya.



Aleg PKS: Ketersediaan Bibit Unggul Langkah Penting Wujudkan Swasembada Pangan

Saya berharap, Balibangtan dapat berkrea-si maksimal dengan Rancangan Pagu Anggaran Balitbangtan tahun 2021 sebesar Rp 1.725,12 miliar. Penyediaan benih di beberapa provinsi, terutama ketersediaan benih dapat segera dilakukan terutama di masa yang akan datang dapat memerangi stunting yang membayangi masyarakat kita

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (14/09) — Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin, mendorong Kementerian Pertanian untuk semakin aktif mewujudkan ketersediaan bibit unggul merata di seluruh Indonesia pada sentra-sentra pertanian dan peternakan.

"Meski Pemerintah telah menyampaikan bahwa berbagai inovasi dan teknologi telah dihasilkan Balitbangtan (Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian), Namun berbagai temuan ini belum terpublikasi secara maksimal. Temuan ini mesti aplikatif yang dapat diterapkan para petani kita sehingga ada keselarasan

antara upaya penelitian dan eksekusi program di lapangan", tutur Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini meminta kepada Pemerintah, salah satu yang harus dilakukan secara masif adalah menyediakan bibit unggul berbagai produk peternakan dan pertanian di seluruh Indonesia.

Dengan jumlah yang mencukupi, dengan kualitas yang baik dan sesuai kebutuhan petani peternak, bibit unggul ini menurut dia menjadi sangat penting untuk di sediakan yang nantinya akan berdampak pada hasil panen

yang memuaskan bersaing dengan produk pangan pertanian termasuk daging dan hortikultura dari luar negeri.

"Ada contoh yang bisa kita lihat dong produk peternakan dan pertanian unggulan kita. Selain publikasi yang baik, di masyarakat akan sangat terasa munculnya produk-produk berkualitas asal dalam negeri. Selama ini yang membanjiri pasar dan memenuhi mata para konsumen kan produk-produk pangan pertanian peternakan asal luar negeri, terutama produk hortikultura", ketus Akmal.

Politisi PKS ini mengakui bahwa yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia yang salah satunya berbagai varietas unggul untuk komoditas tanaman pangan, sayuran dan buah, dan perkebunan sudah dilakukan.

Tapi secara khusus ia mengharapkan Balitbangtan secara berkala, dapat memberikan review atau laporan temuan-temuan Balitbangtan sehingga Komisi IV merasa yakin bahwa Balitbangtan sangat mendukung sektor pertanian peternakan.



Andi Akmal mencontohkan di Sulawesi Selatan misalnya, bibit padi hasil Balitbangtan sangat disukai masyarakat.

"Artinya produk kita cukup bagus, tinggal bagaimana dimaksimalkan sehingga kontribusi Balitbangtan dan Balai-balainya betul-betul dirasakan masyarakat," imbuhnya.

"Saya berharap, Balibangtan dapat berkrea-si

maksimal dengan Rancangan Pagu Anggaran Balitbangtan tahun 2021 sebesar Rp 1.725,12 miliar. Penyediaan benih di beberapa provinsi, terutama ketersediaan benih dapat segera dilakukan terutama di masa yang akan datang dapat memerangi stunting yang membayangi masyarakat kita", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Aleg PKS : *Food Estate* Hanya Bebani Anggaran, Lebih Baik Perkuat Stabilitas Pangan

Saya mendorong pemerintah untuk fokus memperkuat ketahanan pangan kita berbasis peningkatan produksi tanaman pangan dan memperbaiki tata Kelola pangan dengan efisiensi anggaran yang ada agar beban anggaran kita tidak semakin berat ke depan

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (14/09) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyampaikan pandangannya terhadap rencana pengembangan Food estate di Kawasan eks PLG Kalimantan Tengah dengan luas potensial 164.598 hektar.

Menurut Johan, Program food estate yang digagas oleh Pemerintah tersebut hanya membebani anggaran negara.

"Dengan hasil yang tidak pasti dan belum tentu memberikan efek terhadap penguatan ketahanan pangan kita, program tersebut menjadi

beban anggaran," sebut Johan saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI Bersama Menteri Pertanian dan jajaran Kementan pada hari Senin, (14/09/2020) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Politisi PKS ini menilai, program food estate seolah-olah menegasikan NKRI terutama dalam hal keadilan anggaran dimana banyak wilayah kita sangat membutuhkan dukungan anggaran untuk meningkatkan produksi Pertanian dalam negeri dengan berbagai potensi yang dimiliki

setiap wilayah.

"Jadi pemerintah harus melihat soal keadilan anggaran ini, tolong beri prioritas terhadap Kawasan Pertanian yang telah terbukti berhasil memberikan nilai produktivitas Pertanian secara nasional," ucap Johan.

Selanjutnya, Johan juga melihat food estate ini telah menegasikan berbagai kepulauan Indonesia sebagai negara agraris yang semua kepulauannya memiliki potensi pangan lokal.

"Sebaiknya pemerintah optimalkan potensi pangan lokal karena negeri kita ini memiliki potensi pangan lokal yang luar biasa besar dan bisa menjadi substitusi beras sebagai makanan pokok," ungkap Johan.

"Saya berharap program food estate bisa ditunda karena membutuhkan anggaran yang sangat besar dengan hasil yang belum jelas, maka akan lebih baik jika pemerintah fokus memperbaiki kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas harga pangan, keterjangkauan



terhadap bahan pangan serta kualitas dan keamanan bahan pangan," urainya menambahkan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini menyebut bahwa kalau pun nanti berhasil, maka membutuhkan manajemen distribusi yang baik, yang hal ini juga membutuhkan tambahan anggaran, sehingga dampaknya adalah harga pangan juga akan mahal dibandingkan impor.

Johan menilai dibutuhkan anggaran yang sangat besar untuk food estate ini terutama kegiatan ekstensifikasi lahan dan infrastruktur Pertanian disana.

Wakil rakyat dari Pulau

Sumbawa ini berharap pemerintah segera mengambil Langkah tepat dalam situasi pandemic ini dimana ekonomi diambang resesi dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

"Saya mendorong pemerintah untuk fokus memperkuat ketahanan pangan kita berbasis peningkatan produksi tanaman pangan dan memperbaiki tata Kelola pangan dengan efisiensi anggaran yang ada agar beban anggaran kita tidak semakin berat ke depan", tutup Johan.

Anggota FPKS Kritik Dana Triliunan untuk Pembukaan Lahan Gambut

Dana triliunan rupiah untuk lahan gambut, lebih baik dialihkan untuk keperluan mendesak lainnya. Membangun sawah di lahan gambut pernah gagal di masa lalu, kenapa ingin diulang? Padahal ada banyak lahan tidur milik Perhutani dan PTPN yang bukan gambut banyak kok ga digunakan?

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (11/09) — Kegagalan pembukaan lahan gambut dinilai, dana triliunan rupiah menuai kritik Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Slamet.

Anggota Komisi IV DPR RI menilai, dana triliunan rupiah untuk lahan gambut, lebih baik dialihkan untuk keperluan mendesak lainnya.

"Membangun sawah di lahan gambut pernah gagal di masa lalu, kenapa ingin diulang? Padahal ada banyak lahan tidur milik Perhutani dan PTPN yang bukan gambut banyak kok ga digunakan?," ujar Anggota DPR asal

Sukabumi ini kepada media Kamis (11/09).

Menurut Slamet, lahan sawah di lahan ex gambut yang sekarang produktif adalah milik rakyat. Masalahnya, sambungnya, Apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah di sawah milik rakyat.

"Padahal kita ini masih ada sekitar 1,5 juta lahan terlantar yang masih bisa dioptimalkan," tegasnya.

Selain itu, sambung Slamet, Program Pemerintah Food Estate itu akan digarap Kemenhan bukan Kementan. Oleh sebab itu, selama ini tidak

pernah ada rapat kordinasi dengan komisi IV.

"Kami dari komisi IV sulit mau mendukung program tersebut karena perencanaannya masih samar, sementara sekarang Komisi IV diminta memberi persetujuan anggaran, tentu sulit kami mengabdikan," tegasnya.

Menurut Slamet, secara prinsip, program Food Estate utk menjaga ketahanan pangan merupakan ide bagus dan pihaknya setuju.

"Namun Food Estate ini harus diurus di lokasi yg tepat," pungkasnya.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Syaikhu Pertanyakan Tingginya Angka Kecelakaan Kereta Api pada Lintasan Sebidang

Mohon dipertimbangkan untuk mengurangi angka kecelakaan. Khususnya daerah padat yang akan dibuat double-double track, dimana waktu antara satu kereta dengan kereta lainnya semakin pendek, dengan membuat fly over, underpass atau palang pintu pada permintaan sebidang

H. Ahmad Syaikhu
Anggota Komisi V DPR RI

Syaikhu Pertanyakan Tingginya Angka Kecelakaan Kereta Api pada Lintasan Sebidang

Mohon dipertimbangkan untuk mengurangi angka kecelakaan. Khususnya daerah padat yang akan dibuat double-double track, dimana waktu antara satu kereta dengan kereta lainnya semakin pendek, dengan membuat fly over, underpass atau palang pintu pada permintaan sebidang

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (11/09) — Tingginya angka kecelakaan kereta api pada lintasan sebidang mendapat sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu.

Syaikhu mempertanyakan hal itu kepada Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Zulkifli saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis, (10/09/2020).

Menurut Syaikhu, kecelakaan pada lintasan sebidang kerap terjadi khususnya di daerah-daerah padat seperti Karawang-Bekasi.

Tahun 2019 lalu, Kereta api Argo Parahyangan

menabrak kendaraan bus Argo Mas, di perlintasan KM 67 Klari, Kabupaten Karawang, pada Senin (26/08/2019) lalu.

"Saya belum melihat dalam paparan bapak belum ada soal mengatasi hal ini," kata Syaikhu.

Politisi PKS itu meminta agar Kemenhub segera melakukan tindakan untuk mengurangi angka kecelakaan. Sebab, berdasarkan data, selama tahun 2019 telah terjadi 260 kali kecelakaan yang mengakibatkan 76 nyawa melayang pada perlintasan kereta api (KA) sebidang.

Lalu tahun sebelumnya, terjadi 395 kecelakaan yang

menyebabkan 245 orang luka berat sampai meninggal dunia. Total, selama dua tahun telah terjadi 655 kecelakaan.

"Mohon dipertimbangkan untuk mengurangi angka kecelakaan. Khususnya daerah padat yang akan dibuat double-double track, dimana waktu antara satu kereta dengan kereta lainnya semakin pendek, dengan membuat fly over, underpass atau palang pintu pada permintaan sebidang" ujar Syaikhu.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu perlu mempertanyakan hal ini, sebab setiap tahun jumlah pengguna jasa transportasi kereta api terus mengalami peningkatan. Tercatat, pada tahun 2018 jumlah penumpang kereta api tercatat sebanyak 425 juta penumpang. Sedangkan di tahun 2019 jumlahnya mencapai angka 432 juta penumpang.

"Jumlah pengguna jasa yang terus meningkat ini harus diimbangi dengan tingkat kenyamanan, keamanan dan keselamatan yang juga memperbaiki," tegas Syaikhu.



Terkait Pengembangan Pangan Nasional

Aleg PKS: BUMN Harus Buat Road Map yang Jelas

“Dengan adanya kondisi pandemi saat ini, menjadi peluang bagi pemerintah dalam mengoptimalkan BUMN Pangan, terutama dalam membenahi rantai pasokan pangan yang selama ini selalu dikendalikan oleh mafia pangan”

AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (10/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Amin AK mendesak BUMN untuk segera menyelesaikan road map (peta jalan) bagi BUMN di klaster pangan.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kucuran PMN ke sejumlah BUMN Pangan tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kinerja perusahaan.

“Hal ini menjadi penting agar PMN yang dikucurkan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya dan tepat sasaran” ucap Amin.

Menurut Amin, klaster Pangan merupakan klaster yang sangat kompleks sebab

banyaknya stakeholder, regulator, pemain, dan skalanya mulai dari yang sedang hingga sangat besar.

“Holdingisasi BUMN Pangan harus mampu menciptakan struktur yang solid dan terarah, sehingga mampu mengembangkan pangan nasional secara baik” jelas Amin.

Amin mengharapkan pemerintah serius dalam menyelesaikan penyusunan peta jalan untuk mengkonsolidasikan rantai industri pangan secara merata.

“Dengan adanya kondisi pandemi saat ini, menjadi peluang bagi pemerintah dalam

mengoptimalkan BUMN Pangan, terutama dalam membenahi rantai pasokan pangan yang selama ini selalu dikendalikan oleh mafia pangan” ujar Amin.

Amin pun mengingatkan bahwasanya pembentukan holding BUMN Pangan harus ada keterlibatan rakyat dan petani, guna menjamin kesejahteraan petani sekaligus ketersediaan pangan dengan harga terjangkau.



PLN selalu mendapat PMN, Tapi Kinerjanya Tidak Kunjung Membaik

PLN selalu mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN), seharusnya menjadi perusahaan yang tangguh dengan membawa dua misi sekaligus yakni memberikan kontribusi keuangan kepada negara berupa deviden dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang ekstra sehingga masyarakat puas dengan kinerja PLN.

HJ. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (14/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina pada Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR dan PLN, meminta secara khusus kepada perusahaan Plat Merah ini untuk mengurai persoalan yang menjadi akar masalah PLN.

Nevi melihat bahwa PLN selalu mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN), seharusnya menjadi perusahaan yang tangguh dengan membawa dua misi sekaligus yakni memberikan kontribusi keuangan

kepada negara berupa deviden dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang ekstra sehingga masyarakat puas dengan kinerja PLN.

"PLN ini kan perusahaan milik negara. Ketika perusahaan ini memiliki beban yang terlalu berat, itu sama saja memberikan beban juga kepada negara kita ini. Ketika Perusahaan ini memiliki kesehatan keuangan yang baik, maka negara pun akan mendapat dampak baiknya

juga. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih serius terhadap pemunculan beban yang berat bagi PLN terutama pada kontrak-kontrak dengan perusahaan listrik swasta", ungkap Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat ini memperjelas permintaannya yang juga sesuai dengan rekomendasi Fraksi PKS, bahwa PLN agar menghentikan sementara proyek-proyek di bidang pembangkitan yang belum masa konstruksi.

"Masa new normal adalah momentum pemulihan ekonomi. Seluruh ekemen masyarakat sangat bergantung pada PLN agar tetap menjaga mutu dan keandalan pasokan listrik sehingga aktifitas bisnis dan industri tidak terganggu," terang Nevi.

Politisi PKS ini mengatakan, bahwa saat ini PLN menghadapi banyak sekali situasi sulit dan yang paling harus diwaspadai adalah adanya tekanan pertumbuhan ekonomi, konsumsi listrik tidak settings proyeksi awal.

"Di masa covid ini,



keuangan PLN sudah sangat terdampak dengan menurunnya konsumsi listrik pelanggan industri dan bisnis. Penggunaan listrik skala industri yang rendah, telah mengakibatkan pertumbuhan listrik bahkan 5%. Ini sangat jauh dari prediksi awal yang mematok pertumbuhan listrik sekitar 7% hingga 8%," tandasnya.

Pada kesempatan rapat sebelumnya, Nevi telah mengingatkan akan program relaksasi PLN berupa Diskon tarif di masa pandemi covid-19.

Program ini merupakan implementasi salah satu program utama PLN pada

pelayanan masyarakat yang masih terus dinantikan yakni 1. pelanggan rumah tangga 450 VA, diskon 100 % alias gratis selama 3 bulan yang berlaku hingga bulan ini sept 2020; 2. pelanggan rumah tangga 900 VA yang bersubsidi diskon 50% selama 6 bulan (pelanggan 900 VA ada yg bersubsidi dan ada yang non subsidi); 3. pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA diskon 100 % selama 6 bulan dan 4. Pelanggan industri dan bisnis besar bisa turun daya sementara.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Anggota Komisi VII DPR Desak Luhut Awasi Kinerja Smelter Tembaga

Pemerintah jangan lembek, apalagi ikut melanggar UU tersebut. Sanksi atas pelanggaran PTFI ini harus segera diputuskan, sebagai wujud konsistensi Pemerintah dalam penegakan hukum.

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (14/09) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memperhatikan kinerja semua smelter tambang, mulai dari smelter timah hingga tembaga.

Menurut Mulyanto, kalau Pemerintah serius dengan program hilirisasi hasil tambang, semestinya yang diawasi tidak saja kinerja smelter nikel tapi juga smelter tembaga ini.

Smelter adalah fasilitas untuk memurnikan hasil tambang dari berupa bijih logam menjadi logam. Dengan pemurnian ini, maka kita tidak lagi

mengekspor bijih tambang atau konsentrat tembaga, namun hasil produk hilirisasinya yang bernilai tambah lebih tinggi. Harapannya dalam jangka panjang, neraca transaksi perdagangan kita akan lebih positif.

"Pemerintah perlu ekstre kerja keras di tengah pandemi Covid-19 ini, agar kinerja smelter dapat berjalan sesuai target. Sebab masih banyak masalah yang dipertanyakan publik terkait kinerja smelter ini," seru Mulyanto.

Mulyanto berpendapat, secara konseptual program hilirisasi produk tambang melalui smelter ini akan

memunculkan efek berlipis (multifier effect) bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat seperti: diperolehnya produk turunan logam lain, kabel dan asam sulfat; tumbuhnya usaha rantai pasok; tumbuhnya industri terkait di hilir; terbukanya lapangan kerja baru; peningkatan keterampilan SDM dan alih teknologi dalam negeri, dll.

Mulyanto menyangkan, progres pembangunan smelter tembaga seperti jalan di tempat. Sampai dengan bulan Juli 2020, pembangunan smelter baru PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik baru mencapai 5,86% dari target yang seharusnya 10,5%.

"Sangat jauh di bawah 90%. Padahal sesuai dengan keputusan Menteri ESDM No.154 K/30/ MEM/2019, ada ketentuan yang mengatur, bahwa kemajuan fisik pembangunan smelter harus paling sedikit 90% dari target yang ada," tandasnya.

Bila tidak tercapai, lanjutnya, maka sanksinya adalah



penghentian sementara persetujuan ekspor konsentrat mereka.

"Selain itu, perusahaan wajib membayar denda administratif sebesar 20% dari nilai kumulatif penjualan mineral ke luar negeri selama enam bulan terakhir," papar Wakil Ketua FPKS Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Bahkan, kata Mulyanto, PT. Freeport Indonesia berani dan terang-terangan melempar wacana untuk mengusulkan penundaan target pembangunan smelter melebihi batas waktu yang ditetapkan UU, yakni tahun 2023.

"Pemerintah harus tegas menyikapi masalah ini.

Gunakan aturan hukum yang berlaku. Jangan terlalu banyak pemakluman menghadapi perusahaan-perusahaan tambang," tegas Mulyanto.

"Karenanya saya mendesak Pemerintah tegas melaksanakan dan mengawal amanat UU No. 3/2020 sebagai perubahan atas UU. No.4/2009 tentang Minerba, khususnya pasal 170A," imbuh Anggota DPR asal Dapil Banten III ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Anggota FPKS: Realisasi BBM Satu Harga Jauh Dari Target, BPH Migas Harus Kerja Keras

pencanangan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga dilatarbelakangi oleh mahalnnya harga BBM di beberapa daerah terutama di daerah 3T. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Indonesia Bagian Timur menjadi fokus Pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga”

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (16/09) — Realisasi BBM Satu Harga oleh BPH Migas disorot oleh anggota Komisi VII DPR RI. Dari target 253 lembaga penyalur BBM satu harga pada 2020 di Indonesia, Komisi VII mencatat, baru terealisasi 175 lembaga penyalur.

“Masih jauh dari target. Baru mencapai 69%”, terang Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty.

Saadiah memamparkan, pencanangan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga dilatarbelakangi oleh mahalnnya harga BBM di beberapa daerah terutama di daerah 3T.

“Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Indonesia Bagian Timur menjadi fokus Pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga”, terang Saadiah.

Penyediaan BBM Satu Harga oleh lembaga penyalur detail Saadiah memudahkan masyarakat untuk membeli BBM dengan harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini ditegaskan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis

BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional.

“Permen tersebut mengamankan penyalur BBM tersedia di lokasi tertentu yaitu lokasi-lokasi yang belum terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. BPH harus bekerja lebih keras untuk memastikan target 253 lembaga penyalur dapat terpenuhi”, desak anggota FPKS dapil Maluku.

Apalagi kata Saadiah, dalam catatannya BBM satu harga di wilayah – wilayah 3T baik premium maupun solar belum terwujud sepenuhnya.

“Di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau Agen Premium & Minyak Solar (APMS) BBM satu harga belum dinikmati oleh masyarakat”, buka Saadiah.

Dia menegaskan, jika jangkauan kebijakan BBM satu harga di wilayah 3T bisa membantu menumbuhkan ekonomi masyarakat setempat.

“Biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah. Value ekonomi bagi masyarakat di wilayah 3T akan bertumbuh”, katanya.

Saadiah mendorong agar



BPH Migas merencanakan penyelesaian lembaga penyalur di berbagai wilayah terutama di wilayah 3T. Ia berpendapat, penyediaan lembaga penyalur BBM Satu harga akan menghindarkan masyarakat dari high cost operational. Tugas tersebut juga merupakan

misi mulia.

“Penyiapan tempat penyalur BBM satu harga adalah misi mulia untuk masyarakat dan memuliakan penduduk di wilayah 3T. BPH Migas berkewajiban untuk menyelesaikannya”, tandasnya.



Pemerintah Diminta Beri Perhatian Serius Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

“Fungsi fasilitasi pemerintah tetap ada melalui balai-balai yang disediakan. Akan tetapi perlu ada proses pemberdayaan publik untuk bersama-sama menyelesaikan isu sosial

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (15/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta Kementerian Sosial memberikan perhatian serius kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mengakses pendidikan.

Sebab Bukhori menilai sejumlah program penanganan sosial terhadap ABK lebih banyak digerakan oleh masyarakat ketimbang pemerintah.

“Anak-anak yang memiliki masalah mental seperti autis dan lainnya, saya kira belum memperoleh perhatian secara khusus dari Kemensos, khususnya Dirjen Rehabilitasi Sosial. Memang secara usia, ada yang berumur 18 tahun bahkan lebih, akan tetapi secara mental sebenarnya mereka berusia 6 tahun,” ungkapnya.

“Selain itu, saya justru melihat sejauh ini peran publik jauh lebih intensif dalam menyentuh mereka, mulai dari penyediaan panti swadaya sampai penyusunan kurikulum belajar mereka. Sebab itu, tolong pemerintah bisa serius memperhatikan kondisi mereka mengingat mereka adalah aset bangsa kita juga,” imbuh Bukhori saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial di Gedung DPR, Senin (14/09/2020).

Kemendikbud memperkirakan sekitar 70% ABK tidak memperoleh pendidikan yang layak. Sementara, data dari BPS tahun 2017 menunjukkan jumlah ABK di Indonesia mencapai 1,6 juta orang. Artinya, sekitar 1 juta ABK belum memperoleh

pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS ini mendorong Kemensos untuk menggulirkan bantuan yang sifatnya tidak konsumtif semata, tetapi memiliki pola pemberdayaan.

Paradigma ini, tambahanya, perlu dikembangkan dalam rangka membuka pelibatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam merespons isu sosial sekaligus mendorong kemandirian pihak yang dibantu sehingga bisa berdaya.

“Fungsi fasilitasi pemerintah tetap ada melalui balai-balai yang disediakan. Akan tetapi perlu ada proses pemberdayaan publik untuk bersama-sama menyelesaikan isu sosial. Di samping itu, DPR juga perlu dilibatkan oleh Kemensos mengingat selain memiliki fungsi pengawasan, kami juga memiliki fungsi representasi, yakni mewakili orang fakir. Melalui sinergi yang kuat, penyelesaian masalah sosial bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berdampak,” pungkasnya.



59 NEGARA BLOKIR WNI

Imbas Kebijakan Covid-19 Indonesia yang tidak Tepat?



59 negara menurut laporan Kementerian Luar Negeri RI menutup pintu bagi masuknya WN Indonesia terkait tingginya angka Covid-19 di Indonesia. Malaysia menjadi salah satu negara yang melarang masuknya WN Indonesia.



Keselamatan rakyat prioritas utama

Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat dari pandemi covid-19. Soal ekonomi, diplomasi, adalah prioritas sekian

JAZULI JUWAINI

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Saatnya menata ulang Kebijakan

Pemerintah harus segera mengambil sikap dan menata ulang format kebijakannya. Jangan meng-anakemaskan ekonomi tapi meninggalkan kesehatan

NETTY PRASETIYANI

Anggota Komisi IX DPR RI



Harus Jadi Bahan Koreksi Pemerintah

Sikap banyak negara tersebut seharusnya bisa menjadi koreksi dan bahan instrospeksi untuk menyemangati pemerintah melaksanakan kewajibannya

HIDAYAT NURWAHID

Anggota Komisi VIII DPR RI



Tidak ada pilihan lain, Turunkan angka positif covid-19

Berbagai lobi juga akan sia-sia kecuali satu hal dilakukan: menurunkan angka konfirmasi positif Covid-19. Tidak ada jalan lain.

KURNIASIH MUFIDAYATI

Anggota Komisi IX DPR RI

Hentikan Dialektika Pemerintah Pusat dan Daerah, Utamakan Keselamatan Nyawa Rakyat

Pemerintah sudah punya forum lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Silahkan segala dialektika dibahas dalam forum itu lantas hasilnya sebagai aksi nyata bagi penyelamatan nyawa rakyat diimplementasikan. Bukan dialektikanya yang diumbar di publik," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/09).

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (15/09) — Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah pusat maupun daerah menghentikan berbagai polemik soal penanganan Covid-19.

Apalagi, ungkap Mufida, dialektika antara pemerintah pusat dan daerah dipertontonkan secara gambang dan sengaja ke publik lewat statemen para pejabatnya di berbagai media.

Mufida meminta, keselamatan nyawa masyarakat dari ancaman Covid-19 harus lebih diutamakan dibandingkan proses birokrasi pemerintah pusat dan daerah yang tidak efektif apalagi dibawa ke ranah politik.

"Pemerintah sudah punya forum lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Silahkan segala

dialektika dibahas dalam forum itu lantas hasilnya sebagai aksi nyata bagi penyelamatan nyawa rakyat diimplementasikan. Bukan dialektikanya yang diumbar di publik," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/09).

Politisi PKS ini mencontohkan sebelumnya Presiden Joko Widodo gambang meminta prioritas kesehatan di atas ekonomi. Saat kembali diberlakukan PSBB jilid II, terjadi silang pendapat antara kabinet dengan Gubernur DKI Jakarta soal ekonomi yang seolah disisihkan. Presiden kemudian seolah membenturkan PSBB Jilid II di DKI Jakarta dengan menyebut pembatasan skala mikro jauh lebih efektif.

"IHSG dilaporkan merosot, saat pemberlakuan PSBB Jilid II kembali rebound. Itu yang kemarin dipersoalkan di publik sementara nyawa masyarakat masih terus diintai oleh Covid-19. Tolong tegas, mana prioritas yang akan diambil. Jangan kerap berubah-ubah," ungkap



Anggota DPR RI dari Dapil II Jakarta ini.

Mufida kembali mencontohkan seolah tidak ada koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pusat dalam kembali memberlakukan PSBB Jilid II. Di sisi lain Ketua BNPB Doni Monardo yang juga berada di Komite Penanganan Covid-19 mengaku sudah diajak diskusi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Untuk sekelas Komite Penanganan Covid-19 pusat terlihat tidak ada koordinasi yang baik. Panglimanya sebenarnya siapa? alur komandonya bagaimana? masalah-masalah pinggir

yang terus dipersilangkan ke publik. Sengkarut ini seolah mengonfirmasi betapa tidak mengonfirmasi betapa tidak pandemi Covid-19," papar dia.

Mufida meminta semua pejabat publik meninggalkan ego sektoral. Sebab, saat ini mereka bertindak atas nama publik bukan golongan tertentu. Ia khawatir perang terhadap Covid-19 di Tanah Air akan berlangsung lama selama manajemen penanganan kerap berubah-ubah dan tidak dalam komando jelas. "Sekali lagi utamakan nyawa rakyat di atas kepentingan segalanya," paparnya

Ibukota PSBB Total, Pemerintah Minta 50% Tetap Ngantor

Netty: Rakyat Butuh Satu Komando

Masyarakat butuh arahan yang jelas dan tegas, satu komando. Jika kebijakan seringkali tidak sinkron, jangan salahkan jika masyarakat tidak peduli, tidak disiplin dan bertindak semaunya. Akhirnya upaya menarik rem darurat untuk menahan laju kasus menjadi sia-sia

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (12/09) — Memasuki masa PSBB total di Jakarta mulai Senin (14/09), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh perkantoran menerapkan work from home (WFH), kecuali 11 sektor esensial. Namun, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyarankan agar 50% karyawan tetap bekerja bergiliran.

Netty Prasetyani, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS menilai ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah ini akan membuat masyarakat bingung dan akhirnya tidak peduli.

"Masyarakat butuh arahan yang jelas dan tegas, satu komando. Jika kebijakan seringkali tidak sinkron, jangan salahkan

jika masyarakat tidak peduli, tidak disiplin dan bertindak semaunya. Akhirnya upaya menarik rem darurat untuk menahan laju kasus menjadi sia-sia," kata Netty dalam keterangan media, Sabtu (12/09).

Menurut Netty, langkah yang diambil Gubernur DKI mengembalikan aturan PSBB seperti di awal pandemi sudah tepat karena lonjakan kasus positif nyaris tidak terkendali dan angka kematian meningkat, sementara fasilitas kesehatan berupa ruang isolasi dan ICU nyaris kolaps.

"Ibukota menyumbang angka kenaikan kasus baru Covid-19 paling tinggi. Ketersediaan fasilitas ruang isolasi dan ICU di rumah sakit

nyaris penuh. Jika tidak ada langkah darurat, bahaya kesehatan yang lebih besar akan mengancam Jakarta. Apalagi kita tahu, perkantoran adalah salah satu kluster penularan Covid-19," ujarnya.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera melakukan evaluasi darurat terkait penanganan pandemi, utamanya sinkronisasi kebijakan pusat - daerah.

"Pemerintah Pusat seharusnya lebih sigap dan cepat tanggap dengan kondisi darurat. Lakukan koordinasi dan komunikasi efektif dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi. Jangan justru kaget dan baru berkoordinasi setelah ada masalah," katanya.

Netty juga meminta agar langkah kepala daerah yang berorientasi pada keselamatan rakyat harus didukung pemerintah pusat.

"Jakarta adalah ibukota negara, etalase Indonesia. Jika Jakarta terpuruk, kalah perang melawan Covid-19, imbasnya akan serius. Bukankah sekarang sudah 59 negara menutup pintu bagi WNI" katanya.



Pakta Integritas Mahasiswa UI

Aleg PKS: Jangan Berlawanan dengan Tujuan Kampus Merdeka

“Kebijakan kampus merdeka secara esensi tidak hanya mengatur bagaimana kampus merdeka dalam menaikkan level akreditasinya, tapi juga memberi keleluasaan bagi civitas akademisi dalam mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusianya

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Jakarta (11/09) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menilai Pakta Integritas bagi mahasiswa baru di kampus Universitas Indonesia (UI) sebaiknya tidak bertentangan dengan tujuan kampus merdeka yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

“Secara diksi kampus merdeka memberi kemerdekaan bagi intelektual kampus menentu pola pembelajaran yang sesuai, termasuk kemerdekaan

untuk berpendapat dan berserikat,” katanya di Jakarta, Jumat (11/09).

Menurut Fikri, hal tersebut sekaligus menjadi kritik bagi kebijakan kampus merdeka yang digagas oleh Nadiem Makarim.

“Kebijakan kampus merdeka secara esensi tidak hanya mengatur bagaimana kampus merdeka dalam menaikkan level akreditasinya, tapi juga memberi keleluasaan bagi civitas akademisi dalam

mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusianya,” urai dia.

Politisi PKS ini mengingatkan soal program kampus merdeka yang bisa disalahartikan oleh kampus, seperti yang dilakukan UI terhadap mahasiswa barunya.

“Pakta Integritas yang harus diteken maba UI itu malah berpotensi mendistorsi kreatifitas dalam berpendapat dan mengembangkan potensi skill di luar akademisnya,” ujar Fikri.

Mantan aktifis Pelajar Islam Indonesia (PIL) ini merujuk pada poin 10 dan 11 dalam pakta integritas tersebut, yang berbunyi (10) ‘Tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara’, dan (11) ‘Tidak melaksanakan dan/atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi/orientasi studi/latihan/pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau organisasi mahasiswa yang tidak mendapat izin resmi dari



Foto: Antaranews.com

pimpinan fakultas dan/atau pimpinan universitas Indonesia’.

Fikri mempertanyakan poin 10 tersebut, yang secara tidak langsung menyebut politik sebagai bukan kegiatan ilmiah dan bukan aktifitas bernegara.

“Memisahkan politik dari akademis dan kehidupan bernegara bukanlah tujuan kampus merdeka, malah sebuah ironi,” ucapnya.

Dia menyatakan, justru politik harus dibangun dengan pendekatan ilmiah agar demokrasi mampu berdiri secara kokoh dan rasional.

“Ketika bangsa ini sudah rasional, maka akan mudah melahirkan sosok pemimpin-pemimpin yang kuat, yang

mampu membawa negara ini untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya, bukan dengan politik uang, politik dinasti, dan bentuk penyimpangan lain yang kita lihat sekarang ini.”

Fikri menambahkan, rezim Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia masih menganut lima pendekatan, yakni politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).

“Tidak dapat dipisahkan satu sama lain, walaupun ada pandangan apolitis atau memisahkan politik dari sistem ini, sebaiknya belajar lagi,” ujar dia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Politisi PKS Nilai sudah Setengah Tahun Program PEN belum Maksimal Dirasakan Rakyat

jika pertumbuhan realisasi hanya 20% per bulan hingga akhir tahun, maka realisasinya hanya akan mencapai 50-55% saja. Dan jika sekarang belum ada yang mencapai 50%, maka sampai akhir tahun diperkirakan maksimal hanya 50% serapan anggaran yang sudah disediakan. Artinya akan ada dana lebih dari 300 Trilyun yang tidak terserap untuk penanganan Covid ini

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (13/09) — Setengah tahun pandemik Covid-19 telah terjadi di Indonesia. Politisi Senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati menilai kinerja Pemerintah dalam penanggulangan pandemik Covid-19 belum maksimal dirasakan dampaknya oleh rakyat.

Anis menyoroti salah satu program Pemerintah yang merupakan program stimulus untuk ekonomi dalam rangka penanganan Covid-19 yang terangkum dalam satu program yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Kita juga tahu berdasarkan evaluasi, realisasinya sangat tidak maksimal," tutur Anis.

Lebih lanjut, Anis yang juga Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi ekonomi, keuangan dan perbankan, memaparkan bahwa sejak program ini digulirkan realisasi serapan anggarannya hanya 25%.

Anis kemudian merinci serapan anggaran untuk beberapa sektor yang masih terbilang rendah yaitu realisasi anggaran perlindungan sosial hanya 49% dari yang dianggarkan 203,9 Trilyun, anggaran

UMKM yang terlaksana 37% dari 123,46 Trilyun, anggaran kesehatan yang realisasinya hanya 13,38% dari alokasinya yang 87,55 Trilyun.

Demikian juga dengan anggaran untuk kementerian, lembaga dan Pemda baru terealisasi 21,6% dari dana yang dianggarkan sebanyak 106,11 Trilyun.

Selanjutnya untuk insentif dunia usaha, realisasinya hanya 13% dari 120,61 Trilyun, dan program pembiayaan korporasi bahkan sama sekali belum terealisasi dari anggaran 53,57 Trilyun.

Berdasar data di atas Anis memprediksi, jika pertumbuhan realisasi hanya 20% per bulan hingga akhir tahun, maka realisasinya hanya akan mencapai 50-55% saja. Dan jika sekarang belum ada yang mencapai 50%, maka sampai akhir tahun diperkirakan maksimal hanya 50% serapan anggaran yang sudah disediakan.

"Artinya akan ada dana lebih dari 300 Trilyun yang tidak terserap untuk penanganan Covid ini," ujarnya.

Politisi dari dapil Jakarta Timur ini juga menegaskan bahwa rendahnya serapan



anggaran ini menyebabkan tujuan utama Program PEN belum terasa dan belum dinikmati rakyat.

"Hal ini tercermin dalam pertumbuhan ekonomi kuartal ke II tahun 2020 yang masih negatif," paparnya.

Dengan data yang dipaparkannya di atas, Anis mendorong pemerintah untuk

bekerja lebih sigap. Tidak cukup pemerintah mengatakan serius dalam penanganan Covid-19, namun kenyataannya realisasi anggaran sangat rendah.

"Karena ini artinya dana yang dianggarkan tidak dibelanjakan sehingga baru antara 13% hingga 49% saja yang dipergunakan," katanya.

Pelit sama rakyat Tapi Murah hati dengan korporasi



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

“Ketika Pemerintah berbicara soal dana talangan kepada BUMN-
BUMN yang merugi gara-gara salah kelola mudah sekali
mengalokasikan dana triliunan, namun ketika menyangkut dana
yang di alokasikan kepada personal warga negara pemerintah
mengaku kesulitan. Kesannya pemerintah saat ini pelit kepada
rakyat namun murah hati kepada korporasi

H. Sukamta, Ph.D

Anggota Banggar DPR RI



Prioritaskan Anggaran PEN

Banggar DPR Nilai Menkeu Kurang Perhatian Kesejahteraan Prajurit

“Ketika Pemerintah berbicara soal dana talangan kepada BUMN-BUMN yang merugikan-gara-gara salah kelola mudah sekali mengalokasikan dana triliunan, namun ketika menyangkut dana yang di alokasikan kepada personal warga negara pemerintah mengaku kesulitan. Kesannya pemerintah saat ini pelit kepada rakyat namun murah hati kepada korporasi

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Badan Anggaran DPR RI

Jakarta (15/09) — Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani pelit soal anggaran yang langsung menysar ke rakyat.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi kondisi prajurit-prajurit TNI yang memperhatikan kesejahteraannya, ketika sedang bertugas menjaga kedaulatan negara di daerah

perbatasan, terpencil dan terluar Indonesia.

“Pemerintah khususnya Menteri Keuangan seharusnya memberikan kompensasi yang layak bagi anggota TNI yang mendapatkan penempatan tugas di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke,” jelasnya.

Anggota TNI bertugas

dalam waktu cukup lama, lanjut Sukamta, meninggalkan keluarga namun apresiasi pemerintah terhadap kinerja mereka masih kurang.

“Hal ini tercermin dari besaran tunjangan yang diberikan. Besaran tunjangan masih jauh dari standar kebutuhan hidup harian yang kini terus meningkat. Hitung-hitungan saya anggaran yang dibutuhkan untuk menyebut kompensasi yang layak bagi prajurit TNI hanya membutuhkan tambahan Rp 500 miliar,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam DPR RI ini.

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Jogjakarta ini, kemudian membandingkan tambahan anggaran agar prajurit disebut layak tergolong kecil dibandingkan dengan alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 misal talangan utang triliunan kepada BUMN seperti Garuda Indonesia, PLN, Krakatau Steel yang tidak sanggup membayar



hutang gara-gara salah kelola.

“Ketika Pemerintah berbicara soal dana talangan kepada BUMN-BUMN yang merugikan-gara-gara salah kelola mudah sekali mengalokasikan dana triliunan, namun ketika menyangkut dana yang di alokasikan kepada personal warga negara pemerintah mengaku kesulitan. Kesannya pemerintah saat ini pelit kepada rakyat namun murah hati kepada korporasi,” sebut Doktor lulusan Inggris ini.

Sukamta menyatakan bahwa pemerintah pelit terhadap rakyat, dan murah hati kepada elit berkaca dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani dimana menyiram uang ke masyarakat, tidak seperti menyiram toilet.

“Harus bisa memastikan uang tersebut mengalir ke mana, by name, by address, by

their account number. Ini sudah ada anggota TNI yang jelas data-nya, jelas kinerjanya dan jelas dampaknya bisa mendorong daya beli masyarakat malah dikesampingkan,” tandas Sukamta.

Sebagai Wakil Rakyat, Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN DPP PKS) berharap, agar Pemerintah me-ninjau kembali alokasi anggaran yang belum terserap maksimal.

“Anggaran yang tidak langsung berdampak kepada masyarakat lebih baik direalokasi untuk anggaran yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat salah satunya penambahan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan anggota TNI,” usul Sukamta.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Penetapan Postur Sementara RAPBN 2021

Anggota FPKS: PMN Harus di Review Ulang

Proposal PMN yang diajukan oleh Pemerintah dalam rapat panja asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan, di Badan Anggaran DPR RI, sangat prematur, tidak dilengkapi dengan data dan kinerja keuangan BUMN yang akan diusulkan untuk menerima PMN.

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Badan Anggaran DPR RI

Jakarta (11/09) — Anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 35,18 Triliun yang ditetapkan dalam Postur Sementara RAPBN 2021, tidak memiliki sensitivitas terhadap kondisi keuangan negara pada hari ini.

Hal ini disampaikan oleh Rofik Hananto, Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, dalam merespon penetapan Postur Sementara RAPBN yang disampaikan dalam Rapat

Kerja Banggar DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM serta Gubernur Bank Indonesia, di Jakarta, pada Jumat (11/09).

Menurut Rofik, Proposal PMN yang diajukan oleh Pemerintah dalam rapat panja asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan, di Badan Anggaran DPR RI, sangat prematur, tidak dilengkapi dengan data

dan kinerja keuangan BUMN yang akan diusulkan untuk menerima PMN.

"Kami belum bisa menerima penjelasan yang kurang lengkap tersebut, karena ini menyangkut alokasi anggaran yang besar, apalagi kita sedang menghadapi situasi yang tidak menentu pada tahun 2021. nanti", jelas Rofik yang berasal dari Dapil Jateng VII.

Lebih jauh Rofik menyampaikan, Khusus untuk BUMN Biofarma yang mengajukan PMN sebesar Rp. 2 Triliun, masih bisa dimaklumi, karena akan digunakan untuk penguasaan platform teknologi vaksin, terutama untuk vaksin Covid-19.

"Tetapi bagi BUMN lain yang tidak ada kaitannya dengan penanganan Covid-19 dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, belum bisa kita terima, sebelum melihat kinerja keuangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, rencana pengembangan bisnis korporasi untuk peningkatan deviden, tidak kalah pentingnya bagaimana kontribusi BUMN tersebut selama ini terhadap perekonomian nasional yang sesuai dengan amanat UU APBN," terang Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Lebih jauh Politisi PKS ini menyampaikan bahwa pihaknya berharap Pemerintah bisa melengkapi data dan informasi terkait dengan BUMN yang diusulkan sebagai penerima PMN.

"Khususnya rencana



Pemerintah yang akan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) ke PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUJ) sebesar Rp 20 triliun tahun depan," tandasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa PT BPUJ adalah induk perusahaan dari Asuransi Jiwasraya yang sedang bermasalah sangat pelik dan Panja DPR RI Komisi III dan VI terkait Jiwasraya pun belum berjalan.

Nantinya aset dan polis Jiwasraya akan dipindahkan ke Nusantara Life, anak usaha BPUJ. Ini jelas menunjukkan pemerintah seperti tidak memiliki sense of crisis atas kondisi ekonomi nasional yang

berada di ambang resesi.

Pemerintah dalam menyuntikkan Penyertaan Modal PMN juga harus menyampaikan informasi detail dan lengkap terkait dengan data kinerja

keuangan dalam beberapa tahun terakhir, peran dan fungsinya yang sudah sejalan dengan UU BUMN, sehingga nantinya kita bisa menilai apakah BUMN tersebut, sudah layak untuk mendapatkan suntikan PMN atau tidak.

"Sehingga APBN yang kita alokasikan tetap bisa kita pertanggung jawabkan dalam upaya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat", tutup Rofik.

Terkait RUU Cipta Kerja

Baleg FPKS: Pemerintah Jangan Tabrak Otoritas MUI dalam Penetapan Fatwa Halal

Mempercepat proses penetapan fatwa itu kita setuju, namun pengambilalihan ini akan sangat membingungkan. Bagaimana mungkin BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal, sementara proses penetapan fatwa halal untuk produk itu sendiri belum selesai ?,"

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (11/09) — Terkait pembahasan RUU Cipta Kerja soal pengaturan jaminan produk halal, anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Pemerintah memisahkan otoritas yang mengurus regulasi dan administratif dengan otoritas yang menetapkan fatwa halal.

Menurutnya, Pemerintah bertindak sebagai otoritas regulasi dan administratif sedangkan MUI bertindak sebagai pemegang otoritas

fatwa halal. Tidak boleh ada tumpang tindih dan intervensi dalam soal utama ini.

"Pengaturan berupa pemisahan yang tegas antara wilayah otoritas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini sangat penting untuk diperhatikan, karena di satu sisi otoritas MUI terkait dengan keyakinan keagamaan "halal", sementara di sisi lain otoritas BPJPH terkait dengan "kecepatan" proses

administratif penerbitan sertifikasi halal," terang Mulyanto.

Mulyanto menyebutkan, pembahasan RUU Cipta Kerja terkait pengaturan jaminan produk halal ini masih belum tuntas. Sebab Pemerintah menisipkan pasal baru untuk mempercepat proses sertifikasi produk halal, dengan menempatkan posisi superioritas BPJPH yang dapat menabrak wilayah otoritas penetapan fatwa halal.

Dalam RUU Cipta Kerja pasal 35A Ayat (2) diatur ketentuan mengenai: apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan menetapkan fatwa, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal.

Dalam pasal 33 ayat (3) diatur ketentuan, bahwa: "sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau



pengujian produk dari LPH".

Mulyanto berpendapat pengambilalihan penetapan fatwa halal oleh otoritas administratif tidak masuk nalar dan keyakinan agama. Karena, walau bagaimana BPJPH dan MUI ini adalah dua lembaga dengan wilayah otoritas yang terpisah dan kompetensi yang berbeda. Tidak bisa saling mengambil alih.

"Mempercepat proses penetapan fatwa itu kita setuju, namun pengambilalihan ini akan sangat membingungkan. Bagaimana mungkin BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal, sementara proses penetapan fatwa halal untuk produk itu sendiri belum

selesai ?," tanya Mulyanto.

Nanti, lanjutnya, akan memunculkan pertanyaan, apa dasar "kehalalan" dari sertifikat BPJPH yang terbit tanpa fatwa MUI tersebut?

"Ini soal krusial. Jangan sampai kita memasang pasal "bom waktu", yang kelak bisa meledak dan menuai protes umat. Pemerintah perlu cermat dalam soal ini. BPJPH Tidak bisa serta merta mengambil alih proses penetapan fatwa halal MUI," tegas Mulyanto.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



16TH

FRAKSI PKS
Mencintai & Merawat
Indonesia



Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri Lc., M.A.
Ketua Majelis Syura PKS

SAKSIKAN LAUNCHING

LOMBA PIDATO BIOGRAFI TOKOH BANGSA



**16 Tahun Fraksi PKS DPR RI Manunggal Bersama TNI
Mencintai & Merawat Indonesia dan
Memperingati 92 tahun Sumpah Pemuda**



Dr. KH. Miftahurrahim Syarkun
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI
Pemilik di HadisLuz Syariah KH. M. Habibulloh Syarif



H. M. Sohibul Iman, Ph.D
Presiden PKS



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Wakil Ketua DPR RI



Prof. Dr. Abdul Mu'thi, M.Ed
Sekum PP Muhammadiyah

Aleg PKS: Penerapan PSBB Kembali di Jakarta, Upaya Pemimpin Lindungi Rakyatnya

Melihat kondisi Jakarta saat ini, menerapkan suatu kebijakan untuk melindungi warga apalagi kaitannya dengan nyawa, bukanlah suatu pencitraan atau pamer ketegasan. Sebuah kebijakan diambil tentunya setelah melalui kajian dan pertimbangan mendalam, termasuk kajian akan dampak dan resikonya

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (14/09) — Kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta untuk memberlakukan Kembali PSBB di Jakarta, masih menuai pro kontra khususnya di kalangan elit politik.

Pro Kontra muncul setelah sejumlah Menteri menyampaikan kritiknya dengan mengang-gap rencana PSBB Jakarta mengganggu iklim ekonomi, kemudian giliran elit partai yang memberikan komentar, agar kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk pencitraan.

Menanggapi sejumlah kri-tik, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menyampaik-an pandangannya di Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Anis mengatakan bahwa di hari-hari terakhir ini, dimana kita menyaksikan secara langsung masyarakat yang terpapar virus Covid-19 semakin naik angkanya terutama di Jakarta, maka semua pihak perlu berpikir jernih untuk melakukan upaya yang terbaik untuk rakyat.

“Rakyat perlu mendapat-kan perlindungan dan penangan-an yang serius terkait Covid-19 dan dampaknya dari pemerin-tah,” ungkapnya.

Anis juga menyatakan bahwa pihaknya sangat setuju dan mendukung pidato Presi-den Jokowi di Istana Negara (7/9/2020) yang mengingatkan bahwa kunci dari ekonomi kita agar kembali membaik adalah kesehatan yang baik. Kesehat-an yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik.

“Artinya Presiden mene-gaskan bahwa fokus kita yang nomor satu adalah kesehatan dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.

Legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini kemudian menekankan bahwa tugas pemimpin diantaranya adalah melindungi rakyatnya.

Melihat kondisi Jakarta saat ini, menerapkan suatu kebijakan untuk melindungi warga apalagi kaitannya dengan nyawa, menurut Anis bukanlah suatu pencitraan atau pamer ketegasan.



“Sebuah kebijakan diami-bil tentunya setelah melalui kajian dan pertimbangan men-dalam, termasuk kajian akan dampak dan resikonya,” tegasnya.

Anis pun menilai bahwa kebijakan penerapan Kembali PSBB di Jakarta merupakan langkah cepat dari Gubernur

DKI Jakarta dalam merespon arahan Presiden Jokowi. Sebagaimana disampaikan Gubernur DKI, langkah penerapan kembali PSBB, sesuai dengan arahan Presiden.

“Kita do’akan semoga berhasil menekan angka kenaikan Covid-19 di Jakarta,” tutupnya.

Datang ke Padang Pariaman,

Nevi Zuairina Berbagi Paket Bantuan pada Warga

Alhamdulillah beberapa titik sudah terkunjungi untuk berdialog dengan masyarakat. Yang saya tidak seberapa yang penting merata banyak yang dapat bantuan.

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang Pariaman (12/09) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina membagikan paket bantuan mulai sembako hingga perlengkapan penunjang pencegahan covid-19 yang merujuk pada protokol kesehatan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Tujuan utama Nevi mendatangi warga masyarakat terutama di daerah sungai buluh baik sungai buluh barat maupun sungai buluh timur adalah mendapatkan aspirasi masyarakat.

Giat Serap aspirasi ini untuk melengkapi informasi valid yang langsung didapatkan dari masyarakat untuk di tindak lanjuti pada rapat-rapat antara DPR dengan Pemerintah.

"Alhamdulillah beberapa

titik sudah terkunjungi untuk berdialog dengan masyarakat. Yang saya tidak seberapa yang penting merata banyak yang dapat bantuan. Karena akibat pandemi ini telah merambat ke hampir seluruh masyarakat sehingga dampaknya hingga sampai pada guncangnya ekonomi keluarga masyarakat di desa", ujar Nevi.

Politisi PKS ini menemukan berbagai pokok permasalahan yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh satu atau dua lembaga saja.

"Mesti sinergi semua lembaga bahkan perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat merubah kondisi masyarakat untuk di entaskan

dari jurang kemiskinan", ungkapnya.

Pertemuan-pertemuan legislator asal Sumatera Barat ini dilakukan pada ruang-ruang publik maupun rumah warga yang memudahkan warga untuk berkumpul secara mudah dan tetap menjaga jarak. Sehingga bertemunya warga dengan dirinya ia lakukan di banyak titik agar tidak menimbulkan kerumunan yang terlalu padat.

"Alhamdulillah kegiatan-kegiatan pertemuan dengan warga seperti ini tetap dapat dilakukan meskipun dalam kondisi wabah. Tapi memang agak menguras energi karena satu hari bisa 6 hingga 10 waktu pertemuan bergantian kelompok warga yang kami ajak dialog. Semoga dengan begini, jarak masyarakat dengan wakilnya dapat semakin dekat sehingga aspirasi yang ada dapat disuarakan dengan tepat karena memang bersumber langsung dari masyarakat", tutup Nevi Zuairina.



Bukhori Salurkan Bantuan Dana bagi Madrasah Terdampak Covid-19

“Bantuan ini kami berikan sebagai bentuk perhatian kami pada lembaga pendidikan Islam, khususnya di Jawa Tengah. Fraksi PKS di DPR RI memiliki concern yang tinggi terhadap pengembangan SDM yang berakhlak karimah melalui proses pendidikan di madrasah

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (13/09) —Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyalurkan bantuan operasional pandemi kepada sejumlah pesantren, madrasah, dan TPQ di daerah pemilihannya yang meliputi Kota/Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga. Program bantuan tersebut berhasil terselenggara atas kerja sama dengan Kementerian Agama.

“Bantuan ini kami berikan sebagai bentuk perhatian kami pada lembaga pendidikan Islam, khususnya di Jawa Tengah. Fraksi PKS di DPR RI

memiliki concern yang tinggi terhadap pengembangan SDM yang berakhlak karimah melalui proses pendidikan di madrasah. Di satu sisi, kita juga memahami bahwa mereka yang menem-puh pendidikan di madrasah tidak sepenuhnya datang dari kalangan mampu” ungkap Bukhori di hadapan konstituen ketika acara penyerahan bantuan di Salatiga, Minggu (13/9/2020).

Ia menambahkan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi madrasah adalah tulang punggung (backbone)

bagi operasional instansi pendidikan tersebut. Akan tetapi, sejak pandemi merebak Kementerian Agama justru sempat mengeluarkan kebijakan memangkas anggaran tersebut dengan dalih penanganan Covid-19.

“Pemangkas tersebut dilakukan di luar persetujuan Komisi VIII DPR, karenanya kami tolak. Konsekuensinya, raker yang semestinya membahas anggaran, akhirnya kami tunda sampai Menag bersedia mengembalikan dana (red, BOS) yang sudah dipotong sebelumnya” sambungnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VIII tersebut mengatakan bahwa Menteri Agama berjanji mengembalikan dana tersebut. Sehingga, bagi pihak madrasah yang sebelumnya terkena dampak pemotongan dana BOS bisa menagih kembali uang tersebut di masing-masing kantor Kementerian Agama yang ada di wilayahnya.

Sementara, dalam acara penyerahan bantuan tersebut Bukhori menyerahkan bantuan dana masing-masing senilai Rp



10 juta untuk sejumlah TPQ dan Madrasah serta Rp 25 juta bagi beberapa pondok pesantren yang ada di Kota/Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga dalam bentuk SK dari Kemenag untuk kemudian dicairkan di bank-bank yang telah ditunjuk oleh Kemenag.

Politis Dapil Jateng I ini pun turut mengimbau agar sejumlah lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren yang belum memiliki legalitas untuk segera diurus perizinannya. Bahkan, jika dalam proses pengurusan perizinan ditemui kesulitan atau

dipersulit oleh birokrasi, segera laporkan ke pihaknya (red, Bukhori) supaya bisa diadvokasi.

Di samping itu, hal serupa juga ia sampaikan terkait dengan pencairan dana operasional untuk madrasah di Bank.

“Apabila Bank meminta persyaratan di luar persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Kemenag sehingga menyulitkan pencairan, laporkan ke kami. Sebab, bank hanya berlaku sebagai perantara uang, bukan untuk verifikasi kembali. Fungsi verifikasi sudah dikerjakan oleh Kemenag” tegasnya.

Kunjungan Kerja di Dapil

Hermanto Serahkan Bibit Produktif dan Alat Pertanian

Program bibit produktif ini merupakan salahsatu upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan. Bibit-bibit ini, dianjurkan ditanam diawal musim penghujan sehingga perawatannya tidak terlalu sulit. Tapi kalau mau ditanam sekarang juga tidak apa-apa yang penting disiram agar bibit tersebut tidak mati

Dr. HERMANTO, S.E., M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI

Padang (13/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumbang I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan melakukan roadshow menyerahkan bibit produktif dan berbagai jenis alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan Pemerintah.

Bibit produktif diserahkan bersama walikota Padang Mahyeldi Ansharullah kepada masyarakat. Jenis bibit yang dibagikan adalah durian, alpukat, mangga dan jambu madu.

"Program bibit produktif ini merupakan salahsatu upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas

lingkungan", ucap Hermanto.

Bibit-bibit ini, jelasnya, dianjurkan ditanam diawal musim penghujan sehingga perawatannya tidak terlalu sulit.

"Tapi kalau mau ditanam sekarang juga tidak apa-apa yang penting disiram agar bibit tersebut tidak mati", papar legislator dari FPKS ini.

Lebih jauh Hermanto meminta agar bibit tersebut dirawat dengan baik.

"Beri pupuk secukupnya agar bibit tumbuh menjadi tanaman yang subur sehingga kelak menghasilkan buah yang banyak. Buah tersebut bisa dijual sebagai tambahan penghasilan untuk keluarga", tuturnya.

Selain menyerahkan bibit, Hermanto juga menyerahkan berbagai jenis alsintan kepada petani Padang. Alsintan yang dibagikan tersebut adalah traktor roda-4, traktor roda-2, mesin tanam, cultivator, pompa air dan handsprayer. Usai di Padang, penyerahaan alsintan dilanjutkan di Kabupaten Solok.

Penyerahan Alsintan di Padang dihadiri oleh walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dan tokoh muda Dede Suhendi. Penyerahan Alsintan di Kabupaten Solok dihadiri Kepala Dinas Pertanian Siis dan tokoh muda Roi Yurnades.



Bertemu Kelompok Tani di Pangkep

Andi Akmal Salurkan Bantuan Alsintan

Saat ini kami bersama team relawan berkeliling Kabupaten Pangkep untuk melakukan dialog dengan para petani, menyerap aspirasi mereka sekaligus memberikan traktor untuk membajak lahan pertanian”

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Pangkep (15/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin bertemu kelompok-kelompok tani di kabupaten Pangkep untuk melakukan dialog informal sekaligus menyerahkan bantuan alat mesin pertanian yang bekerjasama dengan Kementerian Pertanian.

Dalam satu pekan ini, pria yang akrab disapa Akmal ini bergantian di tiga kabupaten setelah menemui kelompok tani Maros dan Bulukumba.

"Saat ini kami bersama team relawan berkeliling Kabupaten Pangkep untuk melakukan dialog dengan para petani, menyerap aspirasi mereka sekaligus memberikan traktor untuk membajak lahan pertanian", tutur Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini, menurut beberapa kalangan termasuk kelompok tani dinilai sebagai anggota dewan yang selalu konsisten memperjuangkan kebutuhan rakyat dengan menyalurkan program pemerintah langsung pada sasaraannya.

Relawan-relawan yang ia bentuk bekerja tidak mengenal moment moment tertentu saja seperti moment pemilu atau moment pilkada.

Pada kesempatan setelah mendafta semua aspirasi-aspirasi dari para petani pangkep, Akmal berpesan kepada seluruh anggota kelompok tani agar bantuan pemerintah ini berupa traktor tangan untuk mengolah tanah, dapat dipergunakan bersama.

Semua anggota kelompok memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan alat mesin pertanian ini agar digunakan secara maksimal demi pencapaian kualitas produksi pertanian yang semakin membaik.

"Saya berharap, ada kerjasama yang baik setiap anggota dalam kelompok tani, saling membantu dan saling menanggung agar semua bantuan pemerintah dapat bertahan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga bantuan alat mesin pertanian ini manfaatnya maksimal dan menjadi sarana yang efektif efisien dalam peningkatan produksi pertanian", tutup Andi Akmal Pasluddin.



Kunjungan Dapil, Nur Azizah Terima Aspirasi Warga yang Protes Sikap Menag

Sebagai bentuk Ketegasan Komisi VIII kepada Menag, Rapat Kerja (8/9) yang seharusnya membahas masalah Anggaran Tahun 2021, diputuskan untuk ditunda dan hanya mengingatkan agar Menag Fachrul Razi tidak melakukan kesalahan lagi”

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Depok (15/09) — Dalam Agenda Kunjungan Dapil (Kundapil) ke 3 pada Jumat (11/9/2020), Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, menyerap aspirasi warga Perumahan Poin Mas Depok.

Dalam Kundapil yang di gelar di Balai Pertemuan Masjid Nur Al-Basyirah, Perumahan Poin Mas, Pancoran Mas, Depok, warga mengeluhkan perilaku Menteri Agama Fachrul Razi yang dinilai kerap mengambil keputusan sepihak dan melontarkan pernyataan yang kontroversial.

Warga meminta agar

Komisi VIII segera mengambil tindakan tegas agar Menteri Agama tidak secara terus-menerus mengulangi kesalahannya.

“Menteri Agama tidak seharusnya mengurus hal-hal yang kurang esensial. Saya harap tidak sekali ini saja Menag melontarkan pernyataan kontroversial. Saya harap Komisi VIII bisa lebih powerful untuk menindak tegas Menag” Jelas Husaini, salah satu warga Perumahan.

Sebelumnya Menteri Agama Fachrul Razi pernah membuat pernyataan terkait radikalisme yang menurut

Menteri Agama di bawa oleh mereka yang ‘good looking’ atau berpenampilan menarik, hafal quran dan fasih berbahasa arab di hadapan para ASN yg kemudian menyebar di medsos.

Pernyataan Menag tersebut sontak menimbulkan kontroversi di beberapa kelompok masyarakat, tidak terkecuali di Kota Depok.

Nur Azizah sangat menyangkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang kerap dilontarkan Menteri Agama, lalu minta maaf dan melakukan kesalahan lain lagi.

“Menag itu sukanya minta maaf dan mengulangi kesalahan lainnya. Semestinya Menag komunikasi dulu dengan komisi VIII, sebelum mengeluarkan pernyataan. Menag sudah terlalu sering minta maaf kepada Komisi VIII” terang Nur Azizah.

Selain pernyataan yang kontroversial, warga Perumahan Poin Mas Depok juga menyangkan sikap Menteri Agama yang kerap mengambil keputusan sepihak seperti terkait regulasi Haji.



“Kenapa kemenag semudah itu meminta maaf ?, lalu mengulangi kesalahan yang sama. Seperti mengambil keputusan sepihak terkait regulasi haji. Komisi VIII selalu didahului oleh Menag, Komisi VIII seperti tidak dianggap. Harus ada sanksi yang tegas dari DPR” tegas Maman.

Selain itu menurut Nur Azizah, permintaan maaf Menteri Agama terkait pernyataan radikalisme yang kembali diinggung dalam rapat kerja bersama Komisi VIII alasanya kurang tepat.

Menteri Agama menyebutkan pernyataannya dilontarkan hanya pada lingkungan internal ASN, Menag tidak memperhatikan bahwa di era digital semua orang bisa merekam dan menyebarluaskan informasi dengan mudah, hingga menjadi konsumsi publik.

Nur Azizah menegaskan bahwa hingga saat ini Komisi VIII masih terus berjalan pada koridor yang benar dan terus melakukan kritik serta pengawasan lebih khususnya terhadap kinerja Kemenag yang dinilai telah banyak menuai kontroversi.

“Kami di Komisi VIII, sangat menyangkan statement yang dilontarkan Menag, dalam hal ini kami tidak akan lalai dan terus mengawasi, karena masih banyak urusan umat yang harus diperjuangkan. Sebagai bentuk Ketegasan Komisi VIII kepada Menag, Rapat Kerja (8/9) yang seharusnya membahas masalah Anggaran Tahun 2021, diputuskan untuk ditunda dan hanya mengingatkan agar Menag Fachrul Razi tidak melakukan kesalahan lagi” Jelas Nur Azizah.

Bandara Kertajati akan Terhubung Jalan Tol

Syaikhu: Sesuai Harapan Kami

penurunan status menjadi bandara domestik dipastikan akan memberi dampak kurang baik bagi pariwisata di Jabar, khususnya Bandung Raya. Pasti akan ada penurunan. Sebab selama ini banyak maskapai penerbangan yang mengangkut wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke Kota Bandung sebagai destinasi wisata favorit di Jabar," ungkap Syaikhu.

yang mengangkut wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke Kota Bandung sebagai destinasi wisata favorit di Jabar," ungkap Syaikhu.

Kedua, belum siangnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Selama aksesibilitas Kertajati ke Bandung Raya belum ada, wisata ke Bandung Raya akan menurun tajam. Kecuali jika nanti Tol Cisumdawu sudah bisa beroperasi, akan memangkas waktu tempuh Kertajati ke Bandung Raya.

"Bandara Internasional Kertajati belum siap jadi pengganti. Sebab akses ke sana masih belum memadai," kata Syaikhu.

Data menunjukkan, sebelum BIJB beroperasi, volume penumpang melalui Husein Sastranegara mencapai 300.000 per bulan (Juni). Setelah BIJB beroperasi, volume penumpang menurun tinggal 114.000-an. Meski demikian, pergerakan wisman yang melalui bandara Husein ternyata rata-rata masih 4.000 per hari. Bahkan, jumlahnya lebih banyak dibanding BIJB Kertajati yang hanya 2.000 orang per hari.

"Jika Bandara Husein hanya menjadi bandara

memberikan akses jalan tol ke BIJB. Ini terkait dengan rencana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mengusulkan 8 bandara internasional diubah menjadi bandara domestik, salah satunya Husein Sastranegara, Bandung.

Politisi PKS itu minta Kemenhub menunda kebijakan tersebut karena beberapa alasan. Pertama, penurunan status menjadi bandara domestik dipastikan akan memberi dampak kurang baik bagi pariwisata di Jabar, khususnya Bandung Raya.

"Pasti akan ada penurunan. Sebab selama ini banyak maskapai penerbangan



domestik, maka dampaknya tidak hanya ke pariwisata, tapi ekonomi juga," tegas Syaikhu.

Karena itu, rencana pemerintah memberikan akses jalan tol ke BIJB ini seperti angin segar. Secara demikian, BIJB akan mudah diakses dan siap jadi bandara pengganti Husein Sastranegara.

"Ini tentu saja jadi angin segar. Itulah pentingnya koordinasi antar kementerian agar program yang dilaksanakan bisa bermanfaat optimal dan sinergis," ujar Syaikhu.

Seperti diketahui, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya akan membangun akses jalan tol untuk BIJB Kertajati dari Tol Cipali selama satu tahun ke depan, bersama target rampung Jalan Tol Cisumdawu

pada akhir 2021. Dengan konektivitas dua jalan tol tersebut, Basuki optimis pengembangan kawasan Kertajati bisa meningkat lebih cepat.

"Dengan rampungnya Jalan Tol Cisumdawu nanti dan tersambung dengan ruas Tol Akses Bandara Kertajati, maka akan mengurangi waktu tempuh dari Bandung dari tiga jam menjadi satu jam," ujar Menteri Basuki, Senin 7 September 2020.

Kementerian PUPR pada akhir tahun 2020 hingga awal 2021 sudah menyiapkan pembangunan delapan ruas tol baru yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan di Pulau Jawa dan Bali.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan konektivitas Jalan Tol Cipali dan Jalan Tol Cisumdawu selesai pada akhir 2021. Program kerja ini digenjoy untuk mendukung akses jalan tol bagi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Menanggapi rencana ini, Anggota Komisi V DPR RI mengatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan aspirasi dan harapan selama ini.

"Ya Alhamdulillah, ini betul-betul berita gembira karena sesuai harapan kami," ungkap Syaikhu.

Sebelumnya, Syaikhu memang mendesak pemerintah untuk secepat mungkin



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Terima Aspirasi
dari Serikat Pekerja,

Aleg PKS: Kami Senantiasa Berpihak pada Buruh

“Mari kita semua rapatkan barisan dalam mengawal pembahasan Omnibus Law ini. Kami pun sangat terbuka untuk menerima masukan, informasi, dan saran dari seluruh kalangan, sekaligus mohon doanya agar setiap langkah politik yang kami ambil senantiasa mencerminkan kepentingan rakyat”

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI



Terima Aspirasi dari Serikat Pekerja

Aleg PKS: Kami Senantiasa Berpihak pada Buruh

“Mari kita semua rapatkan barisan dalam mengawal pembahasan Omnibus Law ini. Kami pun sangat terbuka untuk menerima masukan, informasi, dan saran dari seluruh kalangan, sekaligus mohon doanya agar setiap langkah politik yang kami ambil senantiasa mencerminkan kepentingan rakyat”

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (15/09) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyatakan komitmen Fraksi PKS untuk senantiasa bersama rakyat dan menunjukkan keberpihakan kepada kaum pekerja dalam mengawal pembahasan RUU Omnibus Law, khususnya pada cluster ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan Mufida saat menerima audiensi dan aspirasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melalui platform virtual Zoom, Selasa pagi (15/09).

“Kami ingin ada keberpihakan yang sangat besar kepada teman-teman pekerja. Karena kalau dilihat dari komposisi kependudukan Indonesia, bisa dikatakan hampir seluruhnya berstatus sebagai pekerja, baik formal ataupun informal. Maka dari itu, seharusnya UU yang berkaitan dengan ketenagakerjaan ini bisa berpihak, melindungi, dan memberikan fasilitas untuk terpenuhinya hak kesejahteraan dan hak hidup layak bagi para pekerja”, jelas Mufida.

Fraksi PKS, lanjut Mufida,

telah melakukan serangkaian pembahasan di internal partai guna menyisir setiap pasal dalam RUU ini, agar tidak melewatkan satupun klausul di dalamnya.

“Kami di PKS, baik itu Anggota, TA Fraksi, TA Poksi, terus bekerja untuk menganalisis seluruh materi dan mengkritisi pasal-pasal yang berpotensi merugikan pekerja dalam RUU Omnibus Law”, ucap Mufida.

Anggota DPR dari Dipil DKI Jakarta ini pun mengharapkan kolaborasi dari berbagai pihak, khususnya kaum buruh, agar PKS selalu istiqomah dalam memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja.

“Mari kita semua rapatkan barisan dalam mengawal pembahasan Omnibus Law ini. Kami pun sangat terbuka untuk menerima masukan, informasi, dan saran dari seluruh kalangan, sekaligus mohon doanya agar setiap langkah politik yang kami ambil senantiasa mencerminkan kepentingan rakyat”, tutup Mufida.



Terima Audiensi dengan JPRMI

Anis Berpesan untuk Fokus pada Tujuan Mulia

“Organisasi-organisasi kepemudaan harus memiliki semangat dan cara berpikir untuk menjadikan organisasi lain sebagai teman bersinergi demi mewujudkan tujuan yang mulia, bukan sebagai musuh”

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (11/09) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menerima audiensi dari Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (JPRMI).

Anis memberikan apresiasi dan pesan kepada JPRMI agar tetap fokus pada tujuan yang mulia dan menjaga niat yang ikhlas dalam menjalankan aktivitas organisasi. Hal tersebut disampaikan melalui audiensi virtual zoom, Jum'at (11/09).
“Organisasi-organisasi

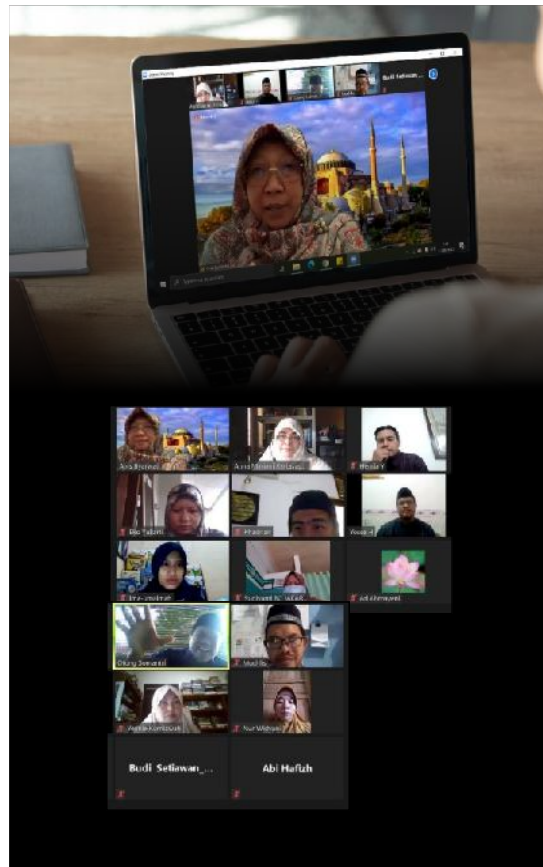
kepemudaan harus memiliki semangat dan cara berpikir untuk menjadikan organisasi lain sebagai teman bersinergi demi mewujudkan tujuan yang mulia, bukan sebagai musuh” ucap Anis.

Anis meminta JPRMI untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengurus JPRMI dengan melakukan aktivitas yang berlandaskan pada nilai yang kuat.

“Nilai ini akan membuat kita bergerak bukan hanya

sekedar menunaikan program, tetapi juga bergerak diatas dasar landasan perjuangan yang kokoh” terangnya.

Tak hanya itu, Anis pun meminta JPRMI untuk melakukan perluasan sasaran. Sebab, sebagai organisasi tingkat nasional, sasaran program JPRMI sudah seharusnya seluruh pemuda yang ada di Indonesia bukan hanya pemuda masjid saja.





Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI